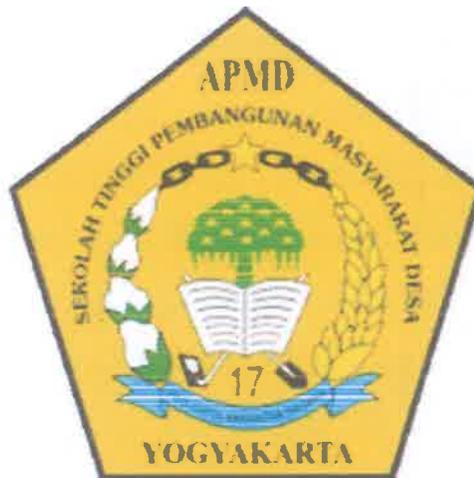


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH**

(Studi Kualitatif di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul)



Disusun Oleh :

OKTOFIANUS MAKAGINGGE

NIM : 20520175

PRODI ILMU PEMERINTAHAN S-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2024



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan di pertanggung jawabkan di depan Tim Penguji untuk memenuhi presyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Agustus
Jam : 13 : 00 WIB
Tempat : Ruang ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Analius Giawa, S.IP., M.Si.

Ketua Penguji / Pembimbing

Minardi, S.IP., M.Sc

Penguji samping I

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., M.P.A

Penguji samping II

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sandan, S.IP., M.A

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Oktofianus Makagingge

NIM : 20510175

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa penelitian skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika terdapat terdapat karya tulis milik orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila di kemudian hari terbukti secara sah melakukan tindakan plagiat (*menjiplak*), maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar dan dengan sebenarnya.

Yogyakarta, Agustus 2024



Oktofianus Makagingge

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua Orang tua tercinta, Markus Makagingge dan Agnes Derek, tidak ada ungkapan lain yang bisa mewakili selain TERIMA KASIH
2. Adriel Makagingge
3. Kakak Nus dan Adik tercinta Endala terima kasih atas support dan pengorbannya.
4. Untuk keluarga besar Makagingge - Derek

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan berkatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Asas Demokrasi Dalam Pengembangan UMKM di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul DIY” sebagai syarat untuk menyelesaikan Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan selama proses menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

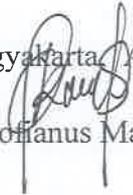
1. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Dr Sutoro Eko Yunanto, M.Si.
2. Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A
3. Dosen pembimbing Analius Giawa, S.I.P., M.Si. Dengan segala hormat terima kasih atas waktu dan bimbinganya dalam penulisan skripsi ini.
4. Penguji sampung I. Minardi, S.I.P., M.Sc.
5. Penguji sampung II. Dr Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A.
6. Pemerintahan Kalurahan, masyarakat dan pelaku UMKM yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan mempermudah segala urusan dalam proses penelitian.
7. Seluruh staf akademik Sekolah tinggi pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
8. Orang tua tercinta Markus Makagingge dan Agnes Derek terima kasih telah membesarkan dan mendidik. Karena kerasnya didikan yang

diberikan penulis punya tubuh, hati dan mental yang kuat untuk bisa sampai saat ini.

9. Saudara tercinta Marten Makagingge dan Hendra Makagingge beserta keluarga besar Makagingge – Derek terima kasih atas Doa dan dukungannya.
10. Almarhum Monica Putri Perdana Kusuma, meskipun kenersamaan kita hanya sesaat, terima kasih atas cinta, pengorbanan, ketulusan dan kasih sayang, terima kasih telah menjadi pacar dan teman yang baik.
11. Untuk perempuan luar biasa Agnes Derek terima kasih tak terhingga karena telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, terima kasih atas kesabaran dan doa dalam mendidik penulis.
12. Kawan seperjuangan Johan E Wairo dan Kekasih, terima kasih supportnya.
13. Kawan Ajir, kawan Ghalib, Shinta, adik Nilam, dan saudara Jofi Cako, SH,.
14. Keluarga besar Ikatan Masiswa Halmahera Utara (IMAHU) DIY
15. Semua orang yang terlibat dan berkontribusi dalam hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan yang dimiliki, penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk karya yang lebih baik kedepannya. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan bagi semua pihak kedepannya.

Yogyakarta, Agustus 2024


Oktofianus Makgingge

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI	xii
BAB I	13
PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praksis	7
F. Literatur Review	7
G. Kerangka Konsep	10
1. Asas Demokrasi.....	10
2. Implementasi	13
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	14
H. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Unit Analisis	19
3. Jenis Data	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Ananlisis dan penyajian data	23
BAB II	26

PROFIL KALURAHAN DAN UMKM SRIHARJO, KAPANEWON IMOIRI, KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DEARAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	26
A. Sejarah Kalurahan.....	26
B. Visi Misi Kalurahan Sriharjo	27
C. Keadaan Demografi Desa Sriharjo	33
D. Keadaan Geografis Desa Sriharjo	36
E. Struktur Organisasi Kalurahan	38
F. Potensi Ekonomi dan UMKM.....	40
BAB III	45
IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM PENGEMANBAGAN UMKM DI KALURAHAN SRIHARJO	45
A. Partisipasi Pemerintah Kalurahan dan Pelaku UMKM dalam Pengembangan UMKM.....	45
B. Transparansi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan UMKM	54
C. Keadilan Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM	60
BAB IV	66
PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Klasifikasi UMKM berdasarkan UU No. 20/2008	16
Tabel 1.2 Data Informan.....	20
Tabel 2.1 Batas Wilayah Kalurahan Sriharjo	37
Tabel 2.2 Kepala Padukuhan	39
Tabel 2.3 Data UMKM kalurahan Sriharjo	43

DAFTAR GRAFIK

Garfik 2.1 Kependudukan Desa Sriharjo	33
Grafik 2.2 Kependudukan Desa Sriharjo Berdasarkan Pendidikan	34
Grafik 2.1 Kependudukan Desa Sriharjo Berdasarkan Jenis Pekerjaan	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta wilayah Kalurahan Sriharjo	37
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kalurahan	39

INTISARI

Penelitian ini tentang “Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pengembangan UMKM” di Kelurahan Sriharjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip demokrasi seperti partisipasi, transparansi dan keadilan dapat diterapkan dalam konteks pengembangan UMKM untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip demokrasi dalam konteks pengembangan UMKM di Kelurahan Sriharjo, yang berkaitan dengan prinsip partisipasi dan transparansi sudah diterapkan dengan baik terlihat keterlibatan dari berbagai pihak, baik itu pelaku UMKM, pemerintah kelurahan dan pihak lain dalam proses pengambilan keputusan dalam menjawab persoalan UMKM. Namun dalam distribusi keadilan masih banyak yang harus diperhatikan. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan pengembangan UMKM agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan UMKM

Kata Kunci. *Asas demokrasi, keadilan, partisipasi, pengembangan UMKM, transparansi.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di singkat UMKM, merujuk pada kategori dengan kekayaan bersih maksimal sebesar Rp 200.000.000, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha. Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Masa depan pembangunan ekonomi negara ini sangat bergantung pada kemampuan UMKM untuk berkembang secara mandiri. Secara umum, tujuan utama adalah menciptakan UMKM yang tangguh dan mandiri, memiliki daya saing yang tinggi, serta berkontribusi secara signifikan dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, dan permodalan guna menghadapi persaingan global.

Pada prinsipnya UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Dalam proses pelaksanaannya UMKM menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi, seperti kekurangan modal baik dari segi jumlah maupun sumber, keterbatasan dalam manajerial dan keterampilan operasional, serta terbatasnya pemasaran. Tantangan ini merupakan masalah mendasar yang sering dijumpai saat UMKM memulai dan mengembangkan usaha. Selain itu, persaingan bisnis yang tidak sehat dan tekanan ekonomi

yang menyebabkan ruang lingkup usaha semakin sempit juga menjadi faktor tambahan yang perlu diatasi, terutama oleh pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan.

Endang purwanti 2012, menemukan bahwa karakteristik wira usaha serta modal usaha, baik secara individu maupun kolektif, memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Sebaliknya strategi pemasaran yang diterapkan secara individu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan usaha. Namun, jika strategi pemasaran di terapkan secara kolektif, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha.

Persoalan yang dihadapi UMKM di atas, dibutuhkan peran aktif Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dapat menerapkan suatu kebijakan strategis yang konstruktif, sehingga semua UMKM dapat *survive* di pasar. Salah satu strategi yang perlu dikembangkan Pemerintah Desa, dengan menerapkan penataan pemerintahan yang demokratis, khususnya kebijakan pengembangan UMKM.

Dalam berbagai kajian teoritis, penerapan tata kelola yang demokratis mendorong institusi untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi pembangunan komunitas dan peningkatan daya saing dalam pengembangan ekonomi daerah.

Pada konteks pengembangan UMKM, *Democratic governance* memungkinkan, terciptanya ruang dialogis antara Pemerintah Desa dengan

pelaku usaha, dan sesama pelaku usaha UMKM. Ruang dialogis ini akan dimanfaatkan, untuk membicarakan berbagai tahapan perencanaan pengembangan UMKM, yang akan menghasilkan suatu kebijakan pengembangan UMKM tanpa diskriminasi. Di dalam *Democratic governance* akan melahirkan kebijakan pengembangan UMKM yang demokratis, sehingga semua pelaku UMKM mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pemasaran produk, bantuan modal dan transfer pengetahuan. Hal ini juga akan meminimalisir kompetisi tidak sehat antara sesama pelaku UMKM.

Kebijakan pengembangan UMKM yang demokratis diperlukan, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku UMKM walaupun mereka tidak menyadari, pada umumnya sistem ekonomi yang dijalankan menggunakan paradigma ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal mengandalkan prinsip bahwa semua keputusan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada pasar, dimana hukum penawaran dan permintaan berlaku. Para pelaku ekonomi di berikan kebebasan penuh untuk bersaing dan merancang strategi guna memenangkan persaingan dalam produksi dan pemasaran produk mereka. Peran negara atau pemerintah terbatas pada fungsi sebagai pelindung dan fasilitator, serta sebagai penengah untuk memastikan kelancaran dan efektifitas kegiatan ekonomi. Pemerintahan dilarang untuk menetapkan regulasi yang dapat menghambat aktifitas pasar atau ekonomi, baik individu ataupun swasta. Individu dan entitas swasta diizinkan untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan optimal guna memaksimalkan keuntungan.

Oleh sebab itu, untuk menepis logika ekonomi liberal masuk dalam aktifitas UMKM yang sarat dengan kompetisi yang tidak sehat, Pemerintah Desa harus campur tangan, pada aspek kebijakan pengembangan UMKM, karena pada prinsipnya Pemerintah Desa memiliki tugas pokok mengadministrasikan keadilan sosial bagi semua warga desa. Tugas pokok ini hanya bisa direalisasikan apabila pemerintahan dan segala kebijakannya dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi.

Penerapan prinsip ini sangat penting, karena diamanatkan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 3 Poin H. bahwa pengaturan desa dijalankan berdasarkan asas demokrasi. Keberadaan UMKM di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul tidak lepas dari tantangan-tantangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Serangan pandemi covid-19 semakin memperparah sektor UMKM. Pemerintah Desa (Pemdes)/Kalurahan Sriharjo membuat pasar digital sebagai langkah strategis membantu UMKM yang kesulitan bertahan di pasar.

Platform yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa, menjadi penting di telah dari asas demokrasi. Hal ini dimaksudkan agar menemukan suatu pemahaman komprehensif, apakah pengembangan UMKM yang telah diupayakan oleh pemerintah desa, sudah memasukan prinsip demokrasi pada semua tahapan, mulai dari perencanaan program, implementasi sampai dengan evaluasi program. Dengan mengedepankan prinsip demokrasi dalam pembuatan *platform*, maka masyarakat akan terberdayakan secara keseluruhan pada setiap tahapan perencanaan.

Menurut Edi Suharto 2017. Pemberdayaan, sebagai sebuah proses, melibatkan lima dimensi utama yaitu Permungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan Pemerliharaan. Pada tahap permungkinan, agen pemberdayaan termasuk pemerintah, organisasi dan masyarakat itu sendiri berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan potensi masyarakat secara optimal dan menghilangkan batasan struktural serta kultural yang menghambat.

Tahap kedua adalah pada dimensi penguatan, agen pemberdayaan berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan mereka. Mereka juga berupaya uantuk mengembangkan kemampuan serta kepercayaan diri masyaraat guna mendukung kemandirian mereka.

Tahap ketiga dari strategi pemberdayaan, salah satu dari strategi dalam pemberdayaan, yang berarti bahwa pemberdayaan harus difokuskan pada penghapusan berbagai bentuk diskriminasi yang merugikan masyarakat kecil. Penyokongan merupakan tahap keempat dari strategi pemberdayaan, di mana tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat agar tidak jatuh kedalam kondisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Sementara itu, pemeliharaan adalah tahap terahir dari strategi pemberdayaan, yang bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan dan keseimbangan sehingga individu memiliki kesempatan untuk berusaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus pada “Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam pengembangan UMKM di

kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul”. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2019 pasal 1 ayat 7 dan 9 tentang pedoman kelembagaan Urusan Keistimewaan pada pemerintahan Kabupaten/kota dan kalurahan. Pemerintah mengubah nomenklatur Desa Menjadi Kalurahan dan Kecamatan menjadi Kapanewon/kemantren sebagai mana diatur dalam Peraturan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana Kalurahan mengimplentasikan Prinsip demokrasi dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Sriharjo?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, transparansi dan keadilan, dalam pengembangan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM). Peneliti berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini sangat penting untuk dijadikan fokus penelitian dan dapat di uraikan sebagai berikut.

1. Partisipasi pemerintah Kalurahan dan pelaku UMKM dalam proses pengembangan UMKM.
2. Transparansi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM
3. Keadilan Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengembangan UMKM, dengan fokus pada tiga prinsip dasar demokrasi : partisipasi Pemerintah Kalurahan dan pelaku

UMKM dalam proses pengembangan UMKM, transparansi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM, serta keadilan Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang berharga bagi para akademisi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya, sehingga dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan evaluasi kalurahan dan dapat memberikan informasi bagi masyarakat Kalurahan Sriharjo pada umumnya terlebih khusus para pelaku UMKM di Kalurahan Sriharjo, Kabupaten Bantul, Propinsi Yogyakarta.

F. Literatur Review

Penelitian tentang Pengembangan UMKM pernah dilakukan oleh Asri Setiyani, Tri Yulianti, Dida Rahmadanik (2022) tentang “Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 255 UMKM di Desa Pekarungan, Kabupaten Sidoarjo dengan mengkolaborasikan antara pemerintah dan para pelaku UMKM. Adanya peran pemerintah desa dalam meningkatkan peran koperasi simpan pinjam yang di miliki Bumdes dalam

kemudahan akses permodalan. Namun masih terkendala transparansi, tata kelola dan lemahnya pembinaan. Selain itu, dalam pengembangan UMKM pemerintah Desa Pekarungan masih belum memiliki program terkait dengan permasalahan yang dihadapi UKMM tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Zalika (2018) berjudul “Demokrasi Desa dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa” menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip demokrasi Desa diterapkan dan dikembangkan dengan asas rekognisi dan subsidiaritas yang berlandaskan pada kehidupan sera budaya masyarakat Desa. Ini mengindikasikan bahwa praktik demokrasi Desa tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga berorientasi pada kemajuan masyarakat desa, sehingga demokrasi desa menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Widayani Wahyuningtyas, dkk. (2023) berjudul “Motivasi dan Komunikasi dalam Pengembangan UMKM di Desa Jatisura” menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jatisura yang menunjukkan motivasi dan komunikasi yang baik cenderung mampu mengembangkan UMKM. Sebaliknya masyarakat yang kurang memiliki motivasi dan komunikasi mengalami kesulitan dalam pengembangan UMKM. Oleh karena itu penelitian ini menekankan bahwa motivasi dan komunikasi merupakan faktor penting dalam pengembangan UMKM.

Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan oleh Maya Yusnita dan Dian Prihardini Wibawa (2020) berjudul “Menakar Peran Pemerintah dan Akademisi Terhadap Pengembangan UMKM “ menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mendukung pengembangan UMKM sudah sangat efektif. Dampak positif dari peran pemerintah tersebut terlihat dalam bentuk pembinaan dan koordinasi dengan pelaku UMKM.

Totok Tumangkar (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Economic Democracy on Micro Small and Medium Enterprises (UMKM) Regulation in Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi ekonomi memberikan kesempatan pemerintah untuk campur tangan dalam bidang ekonomi terutama dalam menciptakan pemerataan dan melindungi usaha kecil dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Penelitian yang dilakukan Riyanti Idayu, Mohamad Husni dan Suhandi, “Strategi Pengembangan (UMKM) untuk meningkatkan Perekonomian masyarakat Desa” penelitian di lakukan di Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten pandeglang Banten. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengidentifikasi masalah yang di hadapi dan menyusun strategi dalam pengembangan UMKM, menggunakan metode penelitian kualitatif melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian di analisis menggunakan analisis matrix SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada setiap pelaku UMKM seperti permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengenalan teknologi, sosial dan ekonomi.

Sedangkan strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah strategi SO (*growth*) yang memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat di simpulkan bahwa penelitian ini akan meneliti tentang Penerapan Prinsip demokrasi Dalam pengembangan UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas terletak pada objek penelitian. Objek penelitian ini berada di, Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY.

G. Kerangka Konsep

1. Asas Demokrasi

Secara etimologi Demokrasi berasal dari kata “*demos*” (rakyat) dan “*cratein*” (Memerintah). Ada beberapa pandangan mengenai demokrasi itu sendiri, namun pada prinsipnya dapat dipahami sebagai paham yang menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah dalam kehidupan bernegara dengan kata lain pemerintahan rakyat, di mana pemerintah tersebut dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi juga merupakan proses pencarian mekanisme yang paling tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, demokarasi tidak hanya berkembang dalam pengertiannya tetapi juga dalam implementasinya.

Gagasan demokrasi mengemukakan bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam konteks ini, kedaulatan sebagai bentuk kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat. Kekuatan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat dapat meliputi aspek politik maupun ekonomi.

Konsep demokrasi apabila diterapkan dalam pengembangan UMKM itu murujuk pada sistem demokrasi ekonomi. Konsep demokrasi ekonomi adalah sebuah konsep yang di perkenalkan oleh para pendiri Negara Indonesia untuk merumuskan bentuk perekonomian yang sesuai dengan karakteristik bangsa indonesia. Moh. Hatta, merumuskan demokrasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 (1) UUD NKRI 1945 menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam artian bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak berbasis persaingan serta atas asas yang individualistik.

Untuk mencapai tujuan pada prinsip asas demokrasi dalam pengembangan ekonomi sesuai dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan pasal 33 ayat (2) UUD1945 adalah “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara.

Gagasan demokrasi ekonomi di Indonesia telah diatur dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menjadi satu-satunya pasal yang secara eksplisit menyebutkan sistem dan merupakan dasar perekonomian nasional. Demokrasi ekonomi menekankan pada kemakmuran masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu dengan memposisikan kesejahteraan masyarakat dan kedudukan rakyat seabgai pusat dari doktrin tersebut. (Asnarita Siregar, 2020).

Selanjutnya (Jimy Asshidiqie, 1994). demokrasi ekonomi bertujuan untuk kemakmuran masyarakat secara keseluruhan, di mana rakyat mempunyai hak

untuk mempunyai peluang ekonomi yang sama dan terlibat langsung dalam proses produksi, pemasaran, sampai dengan penerimaan hasil

Pada prinsipnya demokrasi ekonomi harus menganut partisipasi masyarakat untuk menghindari ketimpangan akses ekonomi. Seluruh masyarakat harus terlibat dalam proses produksi dan masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional. Dalam pengembangan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan hanya di nikmati sebagai kelompok masyarakat atau individu.

Berkaitan dengan fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 3 Poin H. Bahwa pengaturan desa dijalankan berdasarkan asas demokrasi untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Asas demokrasi merupakan salah satu asas dasar dalam menjalankan roda pemerintahan demi pemerintahan yang demokratis. Demokrasi ekonomi juga merupakan asas pelaksanaan dalam menjalankan pemerintahan .

Konsep demokrasi ekonomi masih menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah kalurahan guna mengembangkan potensi UMKM. Ekonomi liberal yang sering kali dihubungkan dengan istilah kapitalisme pasar bebas, dapat menimbulkan tantangan bagi pelaku UMKM, terutama yang baru memulai usaha dan yang berukuran kecil, ketika diterapkan dalam konteks demokrasi. Dalam sistem ekonomi pasar bebas kelompok minoritas yang kuat secara ekonomi seringkali memperoleh keuntungan signifikan. Oleh karena itu, dinamika perekonomian perlu diatur melalui kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam hukum dengan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi.

2. Implementasi

Secara umum implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. (Pramono, 2022). Dalam hal ini, jika dihubungkan implementasi demokrasi mengacu pada pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dan sistem pemerintahan. Tujuan dari implementasi demokrasi adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan dikelola secara adil memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Pramono (2022) Ketika prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam suatu kegiatan ekonomi, ada beberapa aspek kunci muncul. Pertama partisipasi dan keterlibatan, pengambilan keputusan ekonomi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang seimbang dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam sistem yang demokratis masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi yang mempengaruhi mereka, seperti dalam hal kebijakan, peraturan dan pengelolaan sumber daya.

Kedua transparansi dan akuntabilitas, kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan transparansi yang tinggi, di mana informasi terkait kebijakan ekonomi dan keputusan investasi tersedia untuk umum. Selain itu keputusan ekonomi harus akuntabel terhadap masyarakat. Ketiga keadilan ekonomi, implementasi demokrasi dalam ekonomi bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan dan

sumber daya secara adil, mengurangi ketimpangan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi.

Tujuan dari penerapan prinsip demokrasi dalam kegiatan ekonomi adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif dan partisipatif dimana semua individu memiliki suara dan kesempatan untuk memperoleh manfaat. Sebagaimana diatur dalam UUD RI 1945 pasal 33 ayat (1 dan 2) yang mendukung implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam kegiatan ekonomi di Indonesia dengan menekankan pentingnya partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam pengelolaan ekonomi.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di (UMKM) adalah sebuah istilah yang merujuk pada jenis usaha kecil dengan kekayaan bersih maksimal RP 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Mikro Kecil dan menengah memainkan peran sentral dalam kegiatan ekonomi indonesia dan keberhasilan pembangunan di masa depan sangat bergantung pada kemampuan UMKM untuk berkembang secara mandiri. Secara umum, tujuan utama adalah menciptakan UMKM yang tangguh dan mandiri, memiliki daya saing yang tinggi, serta berperan penting dalam produksi distribusi kebutuhan pokok, bahan baku dan permodalan untuk menghadapi persaingan pasar bebas.

Pada dasarnya UMKM merupakan unit usaha produktif yang beroperasi secara mandiri dan di kelola oleh individu atau entitas usaha di berbagai sektor

ekonomi. Dalam proses pelaksanaannya UMKM menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi, termasuk permodalan, baik dari segi jumlah maupun sumbernya, keterbatasan kemampuan manajerial, serta minimnya keterampilan dalam pengelolaan dan pemasaran. Masalah-masalah ini menjadi tantangan mendasar yang di hadapi UMKM dalam mengembangkan usaha. Selain itu, persaingan bisnis yang tidak sehat dan tekanan ekonomi dapat mempersempit ruang lingkup usaha, yang memerlukan perhatian khusus dan solusi dari semua pihak, terutama pemerintah sebagai pemangku kepentingan.

Menurut (Yani Restiani Widjaja, 2018) bahwa UMKM merupakan unit usaha produktif yang beropersari secara mandiri dikelola oleh individu atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Secara umum, perbedaan antara Usaha Mikro (Umi), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB) didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan) omzet tahunan rata-rata atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan ketiga ukuran tersebut bervariasi di setiap negara.

Adapun definisi atau konsep dari UMKM Nasional menurut Dewi et al., (2019) adalah sebagai berikut : Usaha Mikro adalah unit usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha Kecil adalah usaha yang tidak merupakan anak usaha perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau terhubung baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Sementara itu usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dikelola oleh individu, badan usaha, atau cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau merupakan bagian dari usaha menengah atau besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008)

Tabel 1.1

Kriteria UMKM berdasarkan UU No 20 tahun 2008

Ukuran Usaha	Asset	Omset
Usaha Mikro	minimal 50 juta	maksimal 300 juta
Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 juta	maksimal 3 miliar
Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 miliar	> 2,5 – 50 miliar

Sumber: Undang-Undang No.20 tahun 2008

b. Undang – Undang Yang Mengatur UMKM

UMKM memiliki Undang-Undang tersendiri, UU 20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 dan Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866, oleh Menkumham Andi Matalatta pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) diberlakukan pada tahun 2008, pada masa di mana terjadi disrupsi signifikan di berbagai sektor serta krisis ekonomi global. Saat

ini, UMKM telah memasuki era persaingan yang ketat dan menghadapi berbagai tantangan disruptif. Banyak usaha mengalami kegagalan namun terus beradaptasi dengan beralih ke jenis usaha atau model yang berbeda, mengadopsi pendekatan yang lebih moderen dan terdigitalisasi, serta dikenal dengan istilah usaha rintisan (*startup*). Dalam konteks ini tidak hanya modal finansial yang diperlukan, tetapi juga keterampilan dan ide-ide inovatif yang berkompetisi dalam ranah usaha saat ini. Transformasi UMKM sangat jelas terlihat jika dibandingkan dengan masa lalu, meskipun beberapa praktik lama masih ada. Generasi muda kini memandang UMKM dengan perspektif yang berbeda. Meskipun demikian UMKM tetap menjadi komponen utama dalam perekonomian nasional dan terbukti mampu menopang tantangan ekonomi yang ada.

Undang-Undang ini dirancang untuk memperkuat dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Secara keseluruhan, struktur dan isi Undang-Undang ini mencakup, Ketentuan umum, asas, prinsip, dan tujuan pemberdayaan, kriteria, pengembangan iklim usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan serta koordinasi pemberdayaan. Selain itu Undang-Undang ini juga menerapkan sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Bagi Desa, Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan, perlindungan, dan dukungan kepada BUM Desa, koperasi, dan UMKM dalam pelaksanaan usaha mereka. Selain itu, Undang-Undang ini juga mempermudah aliran investasi ke desa melalui kerjasama dengan BUM Desa, Koperasi dan UMKM. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

memfasilitasi pendirian perseroan terbatas (PT) bagi BUM Desa serta usaha Mikro dan Kecil (UMK) di desa dengan menyederhanakan prosedur, termasuk memungkinkan pembentukan perseroan terbatas perorangan. Undang-undang ini juga memberikan keringanan biaya pendirian badan hukum untuk UMK. Selain itu, undang-undang ini memperkenalkan pendirian koperasi primer dengan anggota minimal sembilan orang (sebelumnya minimal 20 orang) dan memungkinkan koperasi untuk menerapkan prinsip usaha syariah. Pendirian UMKM kini dapat dilakukan melalui pendaftaran daring, menggantikan proses perizinan yang kompleks. UMKM mendapatkan insentif berupa pembebasan atau keringanan biaya pendaftaran usaha. Selain itu, sertifikasi halal untuk UMK ayng bergerak di sektor makanan dan minuman kini tidak dikenakan biaya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono 2016). Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan yang sistematis dan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan untuk mencapai hasil atau pengetahuan tertentu yang bermanfaat untuk keperluan penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis yang di terapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menekankan pada kualitas analisis dari pada data

statistik. Penelitian berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan di terapkan pada objek penelitian yang alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu kombinasi berbagai metode. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif dengan hasil penelitian yang lebih berfokus pada makna daripada generalisasi. (Sugiyono 2016).

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis mendalam dan pemahaman kualitas data, bukan statistik. Hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman makse data ketimbang membuat generalisali yang luas.

2. Unit Analisis

a. Lokasi penelitian

Lokasi yang diambil oleh peneliti adalah Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi prinsip demokrasi dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.

c. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kalurahan, Badan permusyawaratan kalurahan dan pelaku UMKM, peneliti memilih subyek penelitian tersebut karena subyek memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM di kalurahan tersebut.

Tabel 1.2
Data Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan
1	Titik Istiyawatun Khasanah, S.I.P	Perempuan	Sarjana	Lurah Sriharjo
2	Gotro Raharjo, S.Si	Laki-laki	Sarjana	Ulu-ulu/seksi Kemakmuran
3	Kuswoyo	Laki-laki		Carik/sekertaris
4	Tutik Nuryati	Perempuan	SLTA	BamusKal
5	Parjiyanti	Perempuan	SMP	Pelaku UMKM
6	Susanto	Laki-laki	SMP	Pelaku UMKM
7	Gotro Raharjo, S. S,i	Laki-laki	S1	Ulu-ulu
8	Damsikin	Laki-laki	SMA	Pelaku UMKM
9	Siti	Perempuan	SMA	Pelaku UMKM
10	Ratna Listiyani	Perempan	S1	Dinas koperasi dan UKM DIY

Sumber, *data informan lapangan*

3. Jenis Data

Penelitian ini melibatkan dua jenis data yang di kumpulkan dan digunakan yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang peneliti peroleh secara langsung dari subjek dan objek penelitian baik perorangan, kelompok, organisasi

ataupun instansi terkait. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan atau responden dalam penelitian (Sugiyono 2019).

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data yang diperoleh dari sumber pihak ke tiga, adalah informasi yang tidak dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. Biasanya, data sekunder berupa dokumentasi atau laporan yang sudah ada sebelumnya. (Sugiyono 2019). Dalam penelitian ini, data sekunder akan di peroleh melalui penelusuran sumber referensi yang relevan. Baik laporan kegiatan ataupun program Kelurahan, jurnal ilmiah, artikel dan dokumen terkait yang berubungan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Menurut Esterberg sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2016), wawancara adalah “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication of meeting about a particular topic*”. Kalimat tersebut menggambarkan suatu pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui pertanyaan dan jawaban, yang menghasilkan komunikasi tentang topik tertentu.

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai metode untuk megumpulkan data sebanyak mungkin tentang penerapan prinsip-prinsip dalam pengembangan UMKM. Wawancara dilaksanakan dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dan fokus

penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Tujuan dari wawancara ini, untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana prinsip demokrasi di implementasikan dalam konteks pengembangan UMKM.

Teknik wawancara di gunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data secara langsung dari informan yang berhubungan dengan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Sriharjo.

b. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan, perhatian, atau pemantauan. Metode pengumpulan data melalui observasi berarti mengumpulkan informasi dengan cara mengamati subjek atau objek penelitian secara cermat, teliti dan sistematis. (Sugiyono 2016). Observasi atau pengamatan adalah metode penghimpunan data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap objek dan subjek penelitian dengan tujuan tertentu. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dan indra. Dalam proses ini, peneliti berperan sebagai pengamat yang juga terlibat secara langsung (sebagai pemeran dan pengamat. Namun, dalam peran sebagai pengamat, peneliti tidak sepenuhnya berfungsi sebagai pemeran, ia lebih berfokus pada pengamatan. Peran ini memungkinkan peneliti untuk membatasi interaksi dengan subjek, terutama dalam hal informasi yang bersifat rahasia.

Observasi menunjukan bahwa jumlah UMKM di Kalurahan Sriharjo sangat signifikan, mencerminkan potensi ekonomi yang sangat

besar. Berdasarkan pengamatan, terdapat forum pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Yogyakarta melalui program Desa preneur pada tanggal 16-18 juli 2024, pelatihan ini diikuti oleh tiga puluh pelaku UMKM, sebagian besar di antaranya adalah perempuan, selain itu, Pemerintah kalurahan juga telah membangun sebuah gedung yang berfungsi sebagai tempat pemasaran dan pameran produk UMKM.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data di lakukan dengan mengumpulkan atau menyalin informasi dari catatan-catatan, laporan-laporan, arsip, foto,yang sudah ada, kemudian mengolahnya untuk keperluan penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mencari laporan-laporan, ataupun foto-foto yang ada di Desa Sriharjo guna mendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengumpulan data melalui dokumentasi ini mencakup :

- 1) Dokumen data base UMKM Desa Sriharjo
- 2) Profil Kalurahan Sriharjo
- 3) Dokumentasi Kegiatan UMKM
- 4) Foto selama penelitian

5. Ananlisis dan penyajian data

Analisis dan penyajian data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode sebagai berikut :

- a. Menyiapkan dan menyusun data langkah ini melibatkan persiapan data baik berupa teks, gambar, ataupun foto untuk keperluan analisis
- b. Reduksi data (Sugiyono 2016) merupakan proses memilih dan merangkum, informasi yang penting, serta menitikberatkan ke elemen-elemen utama, tema dan pola yang tepat. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam menganalisis dan pengumpulan data selanjutnya, serta mempermudah proses pencarian ketika data dibutuhkan.
- c. Menyajikan Data. Tahap ini adalah bagian dari proses analisis data dimana temuan disusun dan disajikan. Proses penyajian dapat dilakukan dalam bentuk teks, tabel, atau grafik.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui uraian, diagram, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016), menyatakan bahwa teks yang bersifat naratif merupakan bentuk yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena kemampuannya menyampaikan informasi secara mendalam. Teks naratif memungkinkan peneliti untuk mengorganisir dan menyajikan data dengan cara yang dapat mengungkapkan kompleksitas fenomena yang diteliti dengan lebih jelas.

- d. *Conclusion Drawing/verification*

Menurut miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016) penarikan kesimpulan dan verifikasi, menunjukkan bahwa kesimpulan awal yang diajukan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak di dukung oleh bukti valid pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang dan konsisten saat data dikumpulkan kembali dilapangan, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel. Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif dapat disesuaikan berdasarkan temuan data lebih lanjut. Validitas kesimpulan ditentukan oleh konsistensi dan dukungan dari bukti yang diperoleh selama penelitian.

BAB II
GAMBARAN UMUM
PROFIL KALURAHAN DAN UMKM SRIHARJO, KAPANEWON
IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL, PROVINSI DEARAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

A. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Sriharjo dibentuk pada tahun 1946. Nama ‘Sriharjo’ diambil dari aspek geografi wilayah serta mata pencaharian penduduknya. Berdasarkan mitos Jawa, kata ‘Sriharjo’ adalah pemberian dari Dewi Sri dan ‘harjo’ yaitu raharjo atau sejahtera. Oleh karena itu, nama Sriharjo berarti desa yang sejahtera dimana mata pencaharian pokok warganya adalah bercocok tanam. Kalurahan Sriharjo awalnya terbentuk dari penggabungan tiga kalurahan lama, yaitu: Kalurahan Mojohuro, Kalurahan Dogongan dan Kalurahan Kedungmiri.

Adapun cikal bakal Pamong Kalurahan/Perangkat Kalurahan Sriharjo adalah sebagai berikut :

1. Lurah : Sosro Margono
2. Carik : Wardo Sumiyarso
3. Jogoboyo : Sastro Suharjono
4. Sosial : Kami Rejo
5. Ulu-Ulu : Sastro Sarjono
6. Modin : Chundori

Pada saat penggabungan, kantor sementara bertempat di rumah Bapak Sosro Margono di Padukuhan Mojohuro. Pada tahun 1951, dibangun kantor baru Pemerintah Kalurahan Sriharjo diatas tanah kas kalurahan di wilayah Padukuhan Mojohuro. Pada masa itu, pembagian wilayah padukuhan di Kalurahan Sriharjo meliputi : Padukuhan Miri, Padukuhan Jati, Padukuhan Mojohuro, Padukuhan Pelemadu, Padukuhan Sungapan, Padukuhan Gondosuli, Padukuhan Trukan, Padukuhan Dogongan, Padukuhan Ketos, Padukuhan Ngrancah, Padukuhan Pengkol, Padukuhan Sompok dan Padukuhan Wunut.

B. Visi Misi Kalurahan Sriharjo

Visi Kalurahan Sriharjo, Menuju Sriharjo Mandiri, berdaulat, Demokratis, Religius Dan Sejahtera.

Mandiri dan Berdaulat

Sriharjo mandiri dan berdaulat memiliki makna bahwa sebagaimana mandat UU Desa, Kalurahan Sriharjo memiliki kemandirian/otonomi dalam mengatur rumah tangga kalurahan sendiri dan mengatur kehidupan bermasyarakat tanpa diintervensi/dipengaruhi oleh pihak manapun. Kemandirian tanpa intervensi ini, bukan berarti Sriharjo tidak membutuhkan bantuan dari pihak luar, baik itu pemerintah kecamatan, kabupaten, Provinsi, Pusat, Perguruan Tinggi, LSM, maupun Swasta. Sriharjo tetap menjunjung tinggi NKRI siap berkontribusi membangun kejaan negeri dimulai dari desa.

Sriharjo membuka diri terhadap segala bentuk kerjasama yang membangun dari pihak luar, baik itu perguruan tinggi, LSM maupun Swasta untuk mewujudkan

masyarakat Sriharjo yang sejahtera. Hanya saja, kedaulatan dan kehormatan Kalurahan tetap harus di pegang teguh dalam kerangka kerja sama ini.

Dalam mencapai kemandirian terdapat prasyarat yang harus di penuhi, salah satunya dalah sumber pendanaan sendiri (pendapatan asli Desa-PADes). Dengn PADes Kalurahan Sriharjo akan lebih leluasa dalam mengelola anggaran, menyelenggarakan program-program yang bertujuan meningkatkan harkat hidup seluruh elemen masyarakat kalurahan Sriharjo. Oleh karenanya selama periode ini, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat kalurahan Sriharjo dan segenap jajaran pemerintah Kalurahan Sriharjo, BPK, Serta dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun perguruan tinggi, LSM, swasta Pemerintah Kalurahan bertekad meningkatkan PADes dengan cara mengoptimalkan segenap aset (materian dan Non material-SDM) yang dimiliki kalurahan, dan Membangun BumKal.

Kedaulatan desa juga tercermin dalam budaya masyarakat, sebagai bagian dari NKRI, Sriharjo juga memiliki budaya adiluhung yang merupakan bagian dari bentuk kedaulatan bangsa. Budaya bangsa selain tercermin dari sikap (gotong royong, tepo seliro, saling menghormati, toleran dan lain-lain) juga tercermin dari seni budaya yang terbangun. Telah menjadi tekad pemerintahan Kalurahan Sriharjo, Bahwa selama periode kedepan akan dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat budaya tersebut, baik yang terwujud dalam sikap dan perilaku maupun pengembangan seni budaya lokal Sriharjo. Dengan demikian harapan adanya daulat budaya di kalurahan Sriharjo benar-benar bisa terwujud.

Demokratis

Sriharjo yang demokratis tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang terbuka, bertanggung jawab, jujur, adil, tanpa korupsi, dan melibatkan segenap elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kalurahan Sriharjo yang demokratis tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, dimana saling menghormati sesama warga.

Kehidupan demokratis juga diharapkan tercermin dalam setiap pengambilan keputusan di kelompok-kelompok masyarakat mulai dari keluarga, RT, Padukuhan, dan organisasi masyarakat yang ada. Pengambilan keputusan diharapkan diambil berdasarkan musyawarah, saling menghormati, dan melibatkan seluruh komponen dalam kelompok. Sikap yang demokratis juga diharapkan dimiliki setiap warga Kalurahan Sriharjo untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat dan kalurahan yang demokratis.

Religius

Sriharjo yang religius tercermin dalam pola kehidupan masyarakat yang senantiasa mendasarkan segenap aktivitasnya pada pertanggungjawaban *ilahiya*. Dengan demikian, setiap diri senantiasa mempertimbangkan langkah-langkahnya untuk berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela/tidak baik.

Sejahtera

Masyarakat dikatakan sejahtera, apabila terdapat situasi dimana masyarakat berkecukupan dalam hal pangan, sandang, papan. Selain itu, masyarakat bisa dikatakan sejahtera apabila terdapat jaminan kesehatan, terpenuhi

kebutuhan akan pendidikan dasar, hidup aman dan tentram, tercukupi hiburan dan hobinya, jauh dari ancaman kekerasan dan bencana alam, serta bebas dari stigma diskriminasi/peminggiran. Dalam konteks ini, Pemerintah Kalurahan Sriharjo akan berupaya untuk lebih memperhatikan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat seperti perempuan, warga miskin, anak, dan difabel agar terhindar dari kekerasan, stigma dan diskriminasi.

Dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di Kalurahan Sriharjo, Pemerintah Kalurahan bertekad untuk memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Kalurahan Sriharjo tanpa terkecuali. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan pangan masyarakat dilanjutkan dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi pertanian, perikanan, pengolahan pangan lokal, serta membangun ketahanan dan kedaulatan pangan di Kalurahan Sriharjo.

Ketahanan pangan akan senantiasa diikuti oleh kedaulatan atas pangan. Dalam hal ini, ketahanan pangan berarti kecukupnya kebutuhan atas pangan bagi masyarakat Kalurahan Sriharjo. Dalam menjamin tercapainya ketahanan pangan ini dibutuhkan kedaulatan atas panga. Sebenarnya Kalurahan memiliki beragam varietas pangan yang bisa dihasilkan dari tanah sendiri, cocok, serta mudah dikembangkan di tanah sendiri selama ini kadang tergilas oleh opini dan pasokan pangan dari luar. Sebut saja salahsatunya gandum. Seperti halnya masyarakat pedesaan di wilayah lainnya. Masyarakat kalurahan Sriharjo demikian ramah dengan gandum. Konsumsi gandum hampir setiap hari dilakukan. Padahal konkret, di kalurahan ini tidak mampu memproduksi gandum. Hal ini tentu

mengancam ketahanan pangan jika masyarakat berada pada taraf ketergantungan pada vareitas pangan semacam ini, karena kalurahan tidak mampu memproduksi sendiri jenis pangan tersebut. Ancaman ketahanan pangan karena masyarakat mengkonsumsi bukan pangan lokal juga akan nampak pada ancaman perputaran perekonomian akibat gaya hidup masyarakat yang tidak mengedepankan konsumsi pangan lokal yang ada. Tetapi terus menerus mengambil jenis pangan dari luar yang tidak bisa di produksi sendiri

Upaya membangun ketahanan pangan di Kalurahan Sriharjo hendak dilakukan mulai dari hal yang sederhana, seperti upaya mengoptimalkan lahan penkarangan maupun menanam pangan dengan polybag di setiap rumah, beternak untuk kecukupan gizi keluarga, dan lain-lain. Upaya lain yang hendak dilakukan adalah dengan memulai kembali membangun lumbung hidup maupun lumbung pangan dalam bentuk ketersediaan bahan pangan (stok). Tentu saja hal ini bisa dilakukan manakala telah tumbuh kesadaran dalam diri masyarakat. Sehingga membangun kesadaran dan gerakan bersama menjadi suatu hal yang hendak dilakukan. Demikian juga dalam hal meraih kedaulatan atas pangan, hal ini hanya bisa di lakukan dengan membangun kesadaran dan gerakan mencatai pangan lokal.

Misi Kaluraha Sriharjo

Visi Kalurahan Sriharo diturunkan dalam beberapa Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kalurahan Sriharjo, baik yang berkaitan dengan persoalan administrasi kependudukan, pertanahan, pendidikan, kesehatan dan hal-hal lainnya.
2. Membangun tata kelola Pemerintah Kalurahan Sriharjo yang bebas korupsi, transparan, adil gender, dan partisipatif.
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan melalui optimalisasi aset Kalurahan dan Pengembangan BUMKal
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan pariwisata Kalurahan dengan mengoptimalkan teknologi tepat guna dan teknologi informasi.
5. Mewujudkan ketahanan dan kedaulatan atas pangan Kalurahan Sriharjo melalui optimalisasi potensi pertanian, peternakan, perikanan, intensifikasi dan diverifikasi lahan pekarangan, serta membina kesadaran dan gerakan cinta pangan lokal.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kalurahan Sriharjo melalui peningkatan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta bersama-sama instansi pendidikan dan kesehatan mendorong lahirnya gerakan sadar pendidikan dan kesehatan.
7. Mengembangkan potensi budaya, olahraga, dan kepemudaan, serta membangun kehidupan masyarakat Kalurahan Sriharjo yang religius.
8. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta difabel di Kalurahan Sriharjo.

9. Meningkatkan upaya-upaya pelestarian lingkungan dan pengurangan resiko bencana.

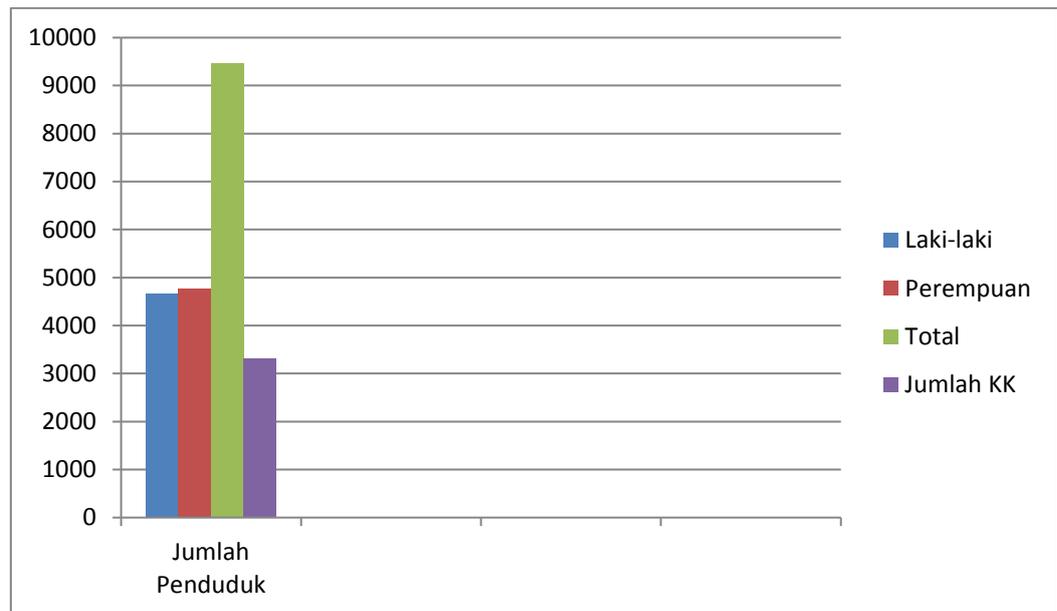
Sumber. *Administrasi kalurahan sriharjo 2022*

C. Keadaan Demografi Desa Sriharjo

1. Berdasarkan Jumlah Penduduk

Grafik 2.2

Garfik Data Kependudukan Desa Sriharjo Tahun 2021



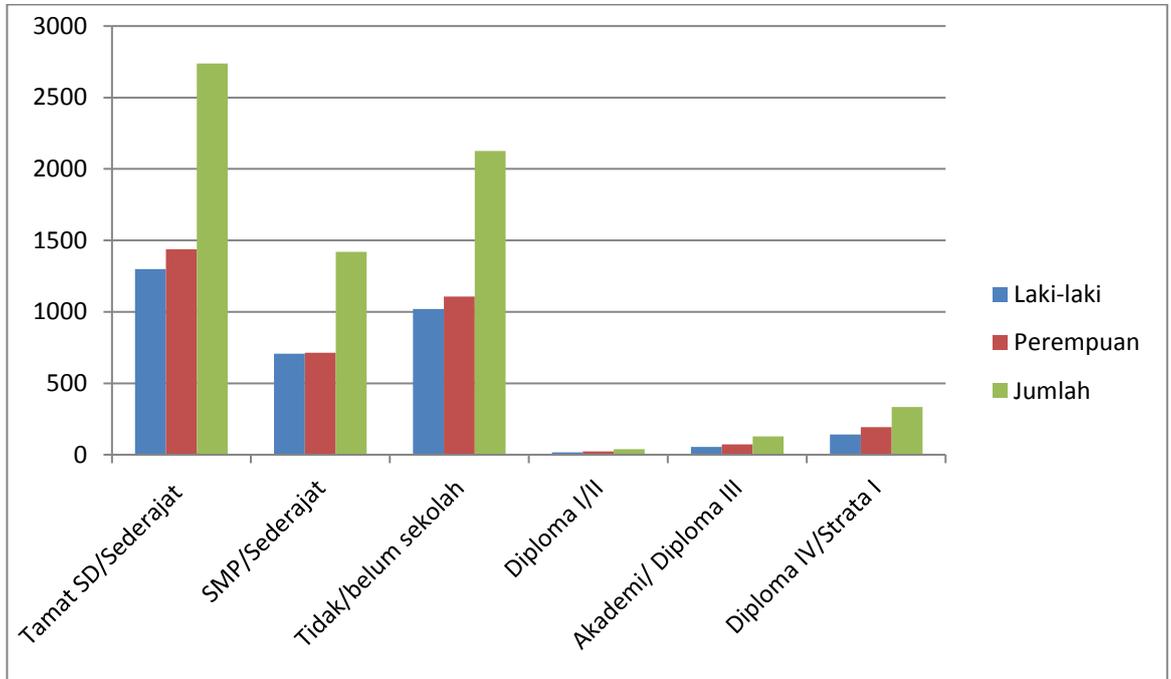
Sumber *Administrasi Kalurahan Sriharjo 2022*

Jumlah penduduk Desa Sriharjo berdasarkan tabel di atas dapat terbagi atas lima dusun, yaitu : Dusun Dogongan, Dusun Jati, Dusun Ketos, Dusun Mojohuro dan Dusun Sompok. Dimana rata – rata jiwa per km² adalah sebesar 1.613,56 jiwa.

2. Berdasarkan Pendidikan

Grafik 2.3

Grafik Data Kependudukan Desa Sriharjo Berdasarkan Pendidikan



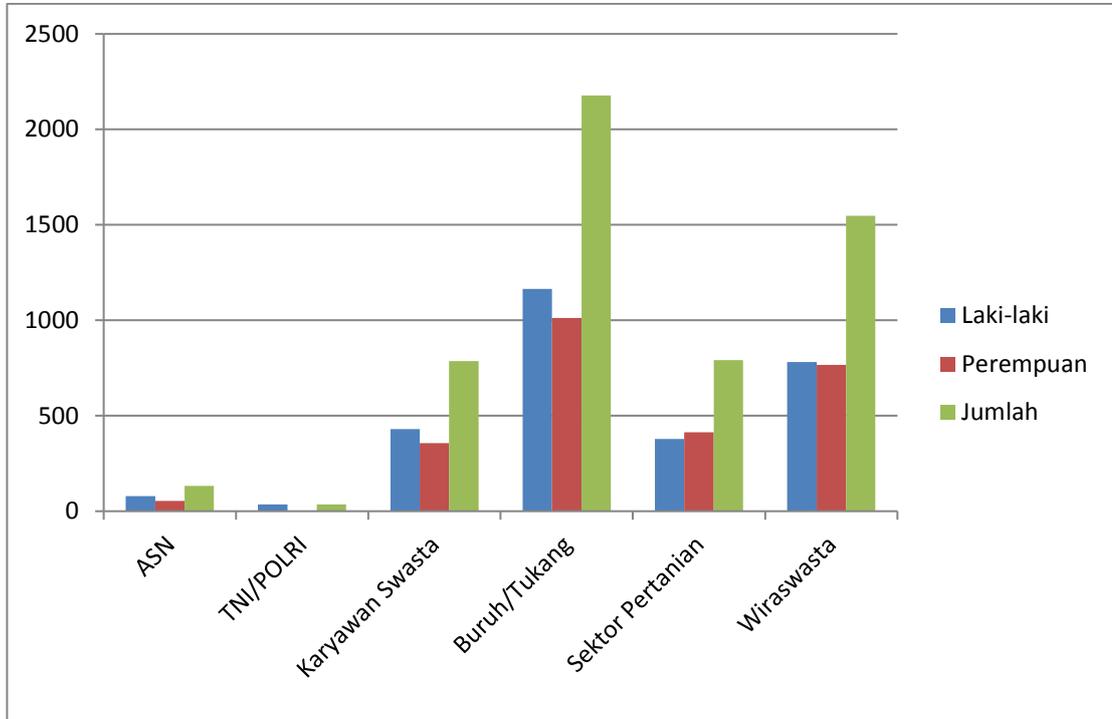
Sumber *Administrasi Kalurahan Sriharjo 2022*

Tingkat pendidikan di Kalurahan Sriharjo masih tergolong rendah. Beberapa faktor yang berkontribusi rendahnya tingkat pendidikan termasuk keinginan anak usia sekolah untuk bekerja, menikah dan adanya pandangan orang tua yang menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting. Dapat dilihat dari data diatas bahwa presentase pendidikan tertinggi adalah yang tamat SD, dan bahkan yang tidak pendidikanpun terbilang cukup banyak jumlahnya, yaitu berjumlah 2.126 orang. Dalam hal ini pengembangan UMKM menjadi cukup terhambat dikarenakan sumber daya manusia yang tidak cukup memadai, pemerintah tentunya juga dapat diharapkan mempertimbangkan faktor pendukung perkembangan sumber daya manusia seperti pendidikan.

3. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Grafik 2.4

Data Penduduk Desa Sriharjo Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Sumber *Administrasi Kalurahan Sriharjo tahun 2022*

Berdasarkan data pada Grafik di atas, dapat dilihat bahwa jenis pekerjaan buruh / tukang berkeahlian khusus menempati posisi pertama sebagai jenis pekerjaan yang banyak ditekuni masyarakat di Desa Sriharjo dengan jumlah 2.177 orang. Pada posisi kedua terbanyak ada jenis pekerjaan wiraswasta dengan jumlah 1.547, dari data tersebut menandakan bahwa pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Sriharjo ini terbilang cukup banyak.

Kalurahan Sriharjo menunjukkan potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi lokal, yang menawarkan peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Agar dapat tercapainya asas demokrasi tentunya dalam hal ini pemerintah tentunya diharapkan untuk dapat memperhatikan potensi – potensi UMKM yang ada di Kalurahan Sriharjo

D. Keadaan Geografis Desa Sriharjo

1. Topografi

Kalurahan Sriharjo adalah salah satu dari delapan desa yang terletak di Kapanewon Imogiri. Wilayah Desa Sriharjo berada dipertemuan antara dua sungai, yaitu Sungai Oya dan Sungai Opak, yang berfugsi sebagai batas alam desa. Sungai-sungai ini terletak disisi selatan dan barat desa dan menjadi sumber utama air untuk irigasi pertanian. Kalurahan Sriharjo berada pada koordinat 110,3964LS/LU-7,94892 BT/BB. Luas wilayah kalurahan Sriharjo adalah 502,36 Hektar dengan jumlah penduduk 9.439 jiwa yang terdiri dari 3.020 Kepala Keluarga. Jarak kalurahan dari dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 3 kilo meter. Jarak dari pusat pemerintahan kota adalah 17 kilo meter. Jarak dari kota/kabupaten adalah 10 km. dari pusat pemerintahan kota adalah 17 km. Batas wilayah kalurahan Sriharjo meliputi : sebelah utara adalah Desa Kebonagung Kecamatan Imogiri dan batas timur yaitu Kalurahan Mangunan Kecamatan Imogiri, batas selatan yaitu Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri, dan batas barat yaitu Desa Srihardono Kecamatan Pundong.

Gambar 2.1
Peta wilayah Kalurahan Sriharjo



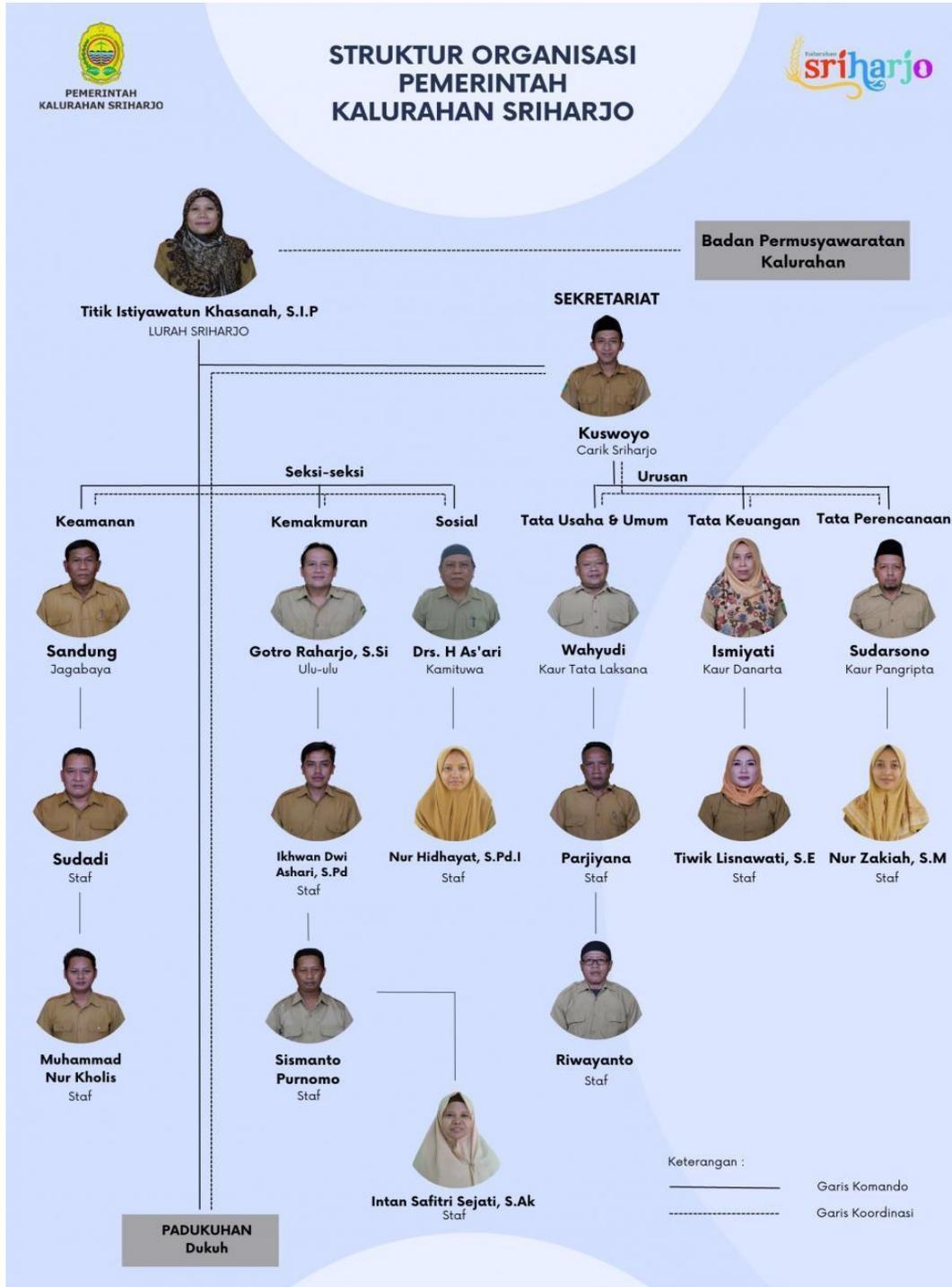
Tabel 2.1
Batas Wilayah Desa Sriharjo

Arah	Batas – Batas
Utara	Kalurahan Kebonagung Kecamatan Imogiri dan Desa Mangunan Kecamatan Dlingo
Timur	Kalurahan Mangunan Kecamatan
Selatan	Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri
Barat	Kalurahan Srihardono Kecamatan Pundong

Sumber : *Administrasi kalurahan Sriharjo Tahun 2022*

E. Struktur Organisasi Kalurahan

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kalurahan



Sumber : *Administrasi Kalurahan Sriharjo 2022*

Dari gambar di atas dapat di lihat bahwa Lurah bertanggung jawab langsung kepada BPK, selanjutnya Lurah atau langsung membawahi Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan, Pelayanan dan Kepala Dukuh. Selanjutnya, Carik atau Sekertaris Desa membawahi kepala urusan Keuangan, Tata usaha dan umum, dan perencanaan.

Tabel 2.3

Kepala Padukuhan

Padukuhan	Nama Dukuh
Padukukuhan Miri	Basharudin
Padukuhan Demen Jati	Bambang Rinadi
Padukuhan Mojohuro	Sulistyo Prihatmadi
Padukuhan Pelemadu	Sumarji
Padukuhan Sungapan	Warsono
Padukuhan Gondosuli	Catur Setyo Dedi Pamungkas, S.TP
Padukuhan Trukan	Andri Priyanto
Padukuhan Dogongan	Budi Saryanto
Padukuhan Kretos	Samsuri
Padukuhan Ngrancah	Jumadi
Padukuhan Pengkok	Ari Usman, S.E
Padukuhan Sompok	Triyono
Padukuhan Wunut	Sugiyanto

Sumber *administrasi kalurahan sriharjo 2022*

Dari tabel di atas dapat dilihat kalurahan Sriharjo memiliki 13 padukuhan yang secara administasi dipimpin langsung oleh lurah atau kepala desa dan yang

memimpin suatu padukuhan disebut kepala dukuh, dari berbagai macam latarbelakang pendidikan orang-orang yang menjabat sebagai kepala dukuh.

F. Potensi Ekonomi dan UMKM

Kalurahan Sriharjo memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terlihat dari data jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan pada grafik 2.3 yang menduduki posisi pertama adalah buruh/tukang dan selanjutnya di posisi kedua adalah wiraswasta. Sentra ekonomi produktif seperti pengolahan kerupuk, peyek kacang, tempe, serta kerajina seperti pahat batu dan kayu, penjahit, keripik sagu, Selain sentra usah tersebut masyarakat Kalurahan Srihajo masih memiliki sentra ekonomi lain seperti peternakan, pertanian, dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman sktor usaha yang signifikan, keunggulan dari berbagai macam sentra ekonomi Produktif Di Kalurahan Sriharjo terletak pada UMKM.

Tabel 2.3

Tabel Data UMKM di Kalurahan Sriharjo

No	Nama Lengkap	Pedukuhan	Nama Usaha
1.	Istinganah	MIRI	Etik Rajut "JOESHA AKSESORIS"
2.	Parjiyanti	SOMPOK	Kue Bawang Yu Jie
3.	Dwi purwanto	SOMPOK	Dwex custom
4.	Suparsilah	MOJOHURO	Kripik tempe & Peyek "IKHSAN"
5.	Agung danang irawan	GONDOSULI	Kerupuk agung
6.	Mugiyono	GONDOSULI	Krupuk Fanina
7.	Riyanto	GONDOSULI	Krupuk Fanina
8.	Nurgiyanti	GONDOSULI	HOME INDUSTRI KRUPUK SURADI
9.	Mujilah	SOMPOK	Ratengan/jualan bubur
10.	Madina	MIRI	Salome dan baso tusuk keliling
11.	Ngadilah	MIRI	Salome Bakso Kang Djoyo
12.	Siti nurkhasanah	MIRI	sayur keliling / pedagang keliling
13.	Mugiyat	MIRI	Aneka snak jajan pasar
14.	Alvi	MIRI	52

15.	Hadi Susianto	MOJOHURO	Dapur cho chox
16.	Ahmad nur arifin	MIRI	Kirana
17.	Sutarmi	MOJOHURO	Anin jaya mebel
18.	Subroto	MOJOHURO	Lundry terima setlika
19.	Marjiyem	MOJOHURO	Penebas padi dan pengilingan padi
20.	Ngadimin	MIRI	Bakso tuusuk
21.	Roes suryani	MOJOHURO	Hanenda Reklame
22.	Dewi sumarsih	MOJOHURO	Cattring
23.	Purwanti	MOJOHURO	DapuR ibuX dan Sakhi_Handmade
24.	Purwanti	MOJOHURO	Catering 2 Putra
25.	Su	MOJOHURO	Catering 2 Putra
26.	Parjiyana	MOJOHURO	Makanan ringan
27.	Guntoro	MOJOHURO	Mbah sudi
28.	Endang Sukeksi	MIRI	Ternak kambing gembel
29.	SUISMI ISTIQQOMAH	SOMPOK	sisis bakar
30.	Bibit sri lestari	MOJOHURO	Jahit
31.	Heri santoso	JATI	buana klinik dan petshop
32.	Warniyati	MOJOHURO	Jualan salome bakso
33.	Heri santoso	MOJOHURO	Penjual gas dan es batu
34.	PAINAH	MOJOHURO	Bakso tusuk
35.	Rudi Ruhiyat	MOJOHURO	TEMPE BU PAINAH
36.	Agustin budi purwanti	MOJOHURO	Budidaya ikan hias
37.	SABIYO	MOJOHURO	Pedagang
38.	Supiah	MOJOHURO	BENGKEL MOBIL
39.	Sutarmi	MOJOHURO	Efa gorengan
40.	Siti robikoh	MOJOHURO	Novita yoga menerima setlika pakaian
41.	Wahyuni	MOJOHURO	Jahit
42.	Juwarni	MOJOHURO	Warung bakmi Sor Tower
43.	Kartika wati	JATI	Menjahit
44.	Rusmilah	TRUKAN	Dapur mak aksa
45.	Emi Lina Rahayu	TRUKAN	Peyek Iqbal Rizky
46.	Ria Listiyana	TRUKAN	Jajanan Alesha
47.	Erni	TRUKAN	Waroeng fadhil
48.	Desi kurniawati	TRUKAN	kerajinan kayu
49.	Tatik winarti	JATI	Abi snak
50.	Nuryanti	JATI	Toko bella
51.	Mujirah	TRUKAN	Keripik sayuran flora
52.	Krismiatusun	JATI	Angkringan
53.	Mujiyati	JATI	Jus
54.	Sinarsih	JATI	Peyek kurnia
55.	Sara Cahya Utari	JATI	Shin craft
56.	Mujiyati	JATI	Omah Nasi Goreng

57.	Kariyah	JATI	Peyek kurnia
58.	Titik haryani susilowati	JATI	Lotek dan tahu guling
59.	Mariyatun	JATI	Soe see cake
60.	Lisa agustrinori	JATI	Bakmi galang
61.	Subiyem	TRUKAN	Angkringan
62.	Suradi	JATI	Miedes asli pundong pak tusiyo
63.	Ferryan Saputro	JATI	Mides Mamik Suradi
64.	Srirejeki	JATI	Framerate Picture
65.	Sarinem	JATI	Tempe koro
66.	SITI NURYATI	JATI	Dapur nasgor mb ninuk
67.	Riyel suwarni/wardi utomo	JATI	Siti snack
68.	Ngatini	JATI	Aneka snack
69.	DWI SUNARTI	JATI	Nila baba girli
70.	Supomo	JATI	Penjahit
71.	Sri rahayu retnoningsih	JATI	Kampung es
72.	Wartini	JATI	Kacang telur rama
73.	Eko Sutarji	JATI	Bakmi gondor .
74.	Suratiyem	JATI	Kerajinan Bambu
75.	ANISAh	JATI	Jualan bubur dan sayur/lauk pauk
76.	Sargiyanti	JATI	Tempe koro
77.	Sridadi	JATI	Penjahit dan online shop
78.	Ayu parjiyanto	JATI	Ratengan mbah sri sego bubur
79.	Suparmi	TRUKAN	Ay1789Shop
80.	Maryanto	JATI	Suparmi
81.	Maryanto	TRUKAN	Rempeyek candra
82.	Saniyem	TRUKAN	rempeyek candra
83.	Jumlah	JATI	Bakmi Sri Roso
84.	Sudarmi	JATI	Produksi Rempeyek
85.	Dwi wulandari	JATI	Bikin tempe kedelai
86.	Wahyudi	JATI	Jajanan anak anak
87.	Atmini Yulianti	TRUKAN	Produksi dan penjualan peyek.
88.	WAGIYEM	NGRANCAH	Berlyan Food Jogja
89.	Sarwanti	TRUKAN	TEMPE KORO
90.	Kasilah	MOJOHURO	Fina fashion
91.	Juremi	JATI	Keripik Tempe Wika
92.	Yuli fatimah	JATI	Kerajinan kayu
93.	asep candra	JATI	Fatimah olshop
94.	Winarni	TRUKAN	konveksi matras camping
95.	Wakijem	TRUKAN	Warung makan
96.	Tumiyati	TRUKAN	Tempe mbah wakijem
97.	Suginem	TRUKAN	Bakmi yu tumi

98.	Sridadi	TRUKAN	Kripik ramadhan
99.	Muji suyono	JATI	Ratengan, nasi bubur gorengan
100.	Wahyuni	JATI	Produksi tempe kedelai
101.	Triyanto/Ratna Purwasari	JATI	Wahyuni Tailor
102.	Faizatunnisa salma faridhotillah	JATI	Aneka Baja Ringan
103.	Soginah	MOJOHURO	Snack Izzah
104.	Tri marbawanti	JATI	Usaha tempe kedelai
105.	Darmini	JATI	Manola store
106.	Sarjiyati	MOJOHURO	Lotek
107.	Pardiyem	MOJOHURO	Ica Rice Bowl & Box
108.	Warjinem	MOJOHURO	Warung kelontong
109.	Samiyati	MOJOHURO	Warung Bubur Mbah Genjol
110.	NOVITA DITA CHRISTIAN	MOJOHURO	Nasi Goreng Bu Inah
111.	Yulianti	JATI	JAMU AMANAH & NARAZA CAKE&COOKIES
112.	Desi kurniawati	JATI	Jualan
113.	Ivo Brahmani Shinta	JATI	Basreng ikan(bakso goreng ikan)
114.	Zeni rohani	JATI	eeVoco Bags
115.	Tarwiyati	JATI	Zeni rajut
116.	Fitriana Aris wulandari	BUTUH	Cireng kriuk aneka rasa
117.	FARUK NURROHMAN	BUTUH	Jajanan pasar

Sumber *Administrasi Kalurahan Sriharjo tahun 2024.*

Dilihat dari tabel di atas meskipun masih bersifat data sementara dapat dilihat bahwa jumlah UMKM yang mencakup berbagai jenis kerajinan, serta olahan pangan dukungan pemerintah Kalurahan sangat penting untuk Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kalurahan. Selain itu, keterlibatan pemerintah Kalurahan juga dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM.

Jika dilihat pada grafik 2.3 data jumlah pekerja, keberadaan UMKM di Kalurahan Sriharjo memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja yang besar di sektor UMKM, mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja yang lebih beragam. Dukungan pemerintah sangat penting untuk memastikan (UMKM) dapat beroperasi secara optimal, mengatasi tantangan, dan berkontribusi besar terhadap perekonomian di Kalurahan.

Dalam konteks ini perlu dilakukan analisis lebih terkait dengan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan terhadap para pelaku UMKM dalam menciptakan daya saing bagi para pelaku UMKM. Persoalan yang dihadapi UMKM saat ini bukan lagi soal akses modal dan produksi melainkan soal mekanisme pasar ekonomi yang semakin ketat, sehingga butuh perhatian khusus dari Pemerintah Kalurahan untuk menjawab persoalan yang dihadapi UMKM saat ini dengan melibatkan langsung para pelaku UMKM dalam pengembangan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pengambilan keputusan, serta evaluasi sehingga dalam menjawab persoalan mekanisme pasar ekonomi saat ini. UMKM dapat hidup, berkembang dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kalurahan dengan meningkatkan pertumbuhan di sektor UMKM selain itu dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.

BAB III

IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI KALURAHAN SRIHARJO

Pada bab ini peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan dengan menggunakan metode seperti yang sudah di jelaskan pada bab sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini mencakup Implementasi Asas Demokrasi dalam pengembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Sriharjo.

Untuk menganalisis Implementasi Asas Demokrasi Dalam Pengembangan UMKM di Kalurahan Sriharjo, dalam hal ini untuk menilai sejauh mana Prinsip-prinsip demokrasi yang di implementasikan dalam kebijakan, program dan praktik mendukung pengembangan UMKM. Berikut adalah beberapa Prinsip dasar dari demokrasi menurut peneliti penting untuk dianalisa.

A. Partisipasi Pemerintah Kalurahan dan Pelaku UMKM dalam Pengembangan UMKM.

Partisipasi masyarakat, pemerintah kalurahan, dan pelaku UMKM dalam pengembangan UMKM merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keterlibatan dari tiga unsur ini membantu memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta meningkatkan daya saing bagi pelaku UMKM di Sriharjo.

Keterlibatan masyarakat terlebih khusus pelaku UMKM, merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dan para pelaku UMKM dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sampai dengan pemanfaatan peluang yang ada.

Partisipasi Pemerintah Kalurahan melibatkan peran serta dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan serta program yang mendukung pengembangan UMKM dan juga pemerintah Kalurahan berperan mengkoordinasikan pihak terkait termasuk lembaga keuangan, lembaga pendidikan, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), dan pihak lainnya yang dapat memberikan dukungan terhadap perkembangan UMKM. Berikut adalah hasil wawancara dari narasumber yang terlibat dan berpartisipasi dalam proses pengembangan UMKM di Sriharjo.

Wawancara dengan Ibu Titik Istiyawatun Khasanah, S.I.P Lurah Sriharjo.

“pengembangan UMKM di Sriharjo dimulai dengan pendataan dan intensifikasi pendampingan melalui pelatihan seperti pengembangan usaha, pemasaran online, inovasi produk dan packing. Kami juga menyediakan modal, menderikan koperasi UMKM, serta memberikan fasilitas seperti alat packing. BumDes di dorong untuk memulai usaha baru, seperti produk mie instan dari mocaf, dengan dukungan dana keistimewaan dan fasilitasi dari dinas koperasi dan ukm DIY termasuk bantuan untuk perizinan dan sertifikasi seperti PIRT, sertifikasi halal dan sebagainya. Partisipasi masyarakat dalam proses ini sangat penting dan kami memastikan dukungan serta dorongan agar semua pihak yang membutuhkan mendapatkan kesempatan yang sama”. (Wawancara 28 juni 2024)

Dari wawancara di atas peteliti melihat dari sudut pandang prinsip demokrasi yaitu partisipasi. Pengembangan UMKM di Kalurahan Sriharjo menunjukkan bahwa ada upaya baik dari pemerintah kalurahan untuk

melibatkan masyarakat, terlebih khusus pelaku UMKM dalam berbagai aspek perkembangan ekonomi.

Dari sudut pandang partisipasi dalam demokrasi keterangan dari narasumber di atas ada beberapa poin penting yang menurut peneliti dilakukan oleh pemerintah kalurahan. Pertama, keterlibatan Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM dimulai dari pendataan yang merupakan langkah awal untuk mengetahui kebutuhan dan potensi masyarakat. Selain itu, program pelatihan yang ditawarkan seperti pelatihan pengembangan produk, pemasaran online serta bantuan untuk memperoleh sertifikasi halal, dan PIRT. Proses pendampingan untuk memperoleh izin usaha, sertifikasi halal, dan hak cipta hal ini menunjukkan upaya untuk membuat sistem perizinan lebih mudah di akses oleh pelaku UMKM.

Kedua kolaborasi dengan pihak eksternal, kolaborasi dengan dinas terkait dan penggunaan dana keistimewaan menunjukkan bentuk dukungan yang melibatkan berbagai pihak dalam proses pengembangan UMKM. hal ini mencerminkan prinsip demokrasi yang memperhatikan masukan dari berbagai stakeholder dan menyediakan bantuan yang dibutuhkan. Selain itu, bantuan berupa modal, alat-alat packing dan fasilitas lainnya menunjukkan upaya untuk memastikan akses yang adil bagi semua pelaku UMKM. dengan adanya fasilitas dan modal ini pelaku UMKM dapat berpartisipasi pada pasar yang lebih luas dan berkompetisi secara efektif.

Ketiga mendorong BUM Desa untuk memulai usaha baru seperti pembuatan mie istan dari mocaf adalah contoh bagaimana partisipasi lokal dioptimalkan. Hal ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengembangan ekonomi di kalurahan dan menciptakan lapangan kerja baru.

Wawancara dengan Carik Kalurahan Kuswoyo menyampaikan bahwa.

“UMKM di Sriharjo cukup banyak, beberapa tahun ini cukup kita program untuk pengembangan kita dampingi dengan segala kebutuhan yang ada, mulai dari membuat produknya, bagaimana membuat produk yang baik, sampai ke pemasarannya. Pemasarannya bahkan kita dampingi tidak hanya dengan metode yang offline aja, kita juga berupaya untuk bagaimana bisa ke online. Kita ada forum untuk pertemuan rutin untuk mengetahui kendala mereka kemudian mendiskusikan dan itu semua pelaku UKMKM kita libatkan”. (Wawancara 25 juni 2024)

Dari keterangan informan di atas peneliti melihat bahwa prinsip partisipasi dalam demokrasi tercermin dari berbagai inisiatif yang dilakukan untuk mendukung perkembangan UMKM di Sriharjo. Melalui pendampingan menyeluruh, forum pertemuan rutin, dan dukungan pemasaran offline dan online, program ini memastikan bahwa pelaku UMKM tidak hanya terlibat dalam proses pengembangan tetapi juga memiliki suara dalam mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Partisipasi ini menunjukkan mereka berkontribusi secara aktif dan merasakan manfaat dari program atau kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan. Hal ini selaras dengan prinsip demokrasi yang menekankan keterlibatan dan kolaborasi.

Wawancara dengan Pak Gotro Raharjo, S. Si sebagai Ulu-ulu/seksi

kemakmuran, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa :

“Sekarang masuk desa binaan itu dari Dinas Koperasi itu ada binaan juga, di desa preneur dan desa prima itu rata-rata gabungan dari ibu-ibu UMKM, itu ada yang industri mash kayak kue kering, trus ada yang industri kerajinan, trus ada industri yang kayak batik dan sebagainya. Itu ada wadahnya kita sudah ada namanya POLSRI (Pusat Oleh-oleh Sriharjo) jadi rata-rata produk UMKM itu kita simpan di POLSRI itu satu gedung sama dengan gedung mocaf itu produksi SRIMI (mie instan dari bahan baku mocaf) salah satu produk unggulan di Sriharjo. Peran Sriharjo masuk ke pembinaanya kadang- kadang kita juga bisa menghasilkan modal dari BUMDes, tapi kita masih merintis jadi baru beberapa UMKM yang memang benar-benar bisa mandiri yang rata- rata masih industri kecil. Rencananya supporting desa ke UMKM itu kedepannya tidak putus karena kita juga menggaet beberapa donatur dari luar. Dimana nanti UMKM Sriharjo itu bisa benar-benar bukan industri kecil lagi tapi masih membutuhkan supporting banyak. Rata-rata semua UMKM kita panggil, semua masyarakat kita libatkan di forum itu kita bahas kedepannya kita mau ngapain, rata-rata kalau UMKM kita ada porsi sendiri baik itu BUMDes dan dana Desa rata-rata prioritas apa yang nanti kita gelontorkan untuk UMKM. yang jelas untuk binaan itu rata-rata berkelanjutan, rata-rata setiap tahun kita fasilitasi yang dikembangkan sesuai arahan dari dinas koperasi itu prioritas desa Preneur dan desa prima”. (Wawancara 15 juli 2024)

Dari sudut pandang partisipasi, keterangan dari narasumber di atas peneliti melihat bahwa pengembangan UMKM di kalurahan Sriharjo menunjukkan penerapan prinsip demokrasi yang baik. Dengan melibatkan pelaku UMKM dalam pengelolaan melalui Pusat Oleh-oleh Sriharjo (POLSRI) yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memasarkan produk dari berbagai jenis UMKM di Sriharjo, mengadakan dan membahas prioritas serta alokasi dana dalam forum komunitas yang melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM.

Dalam mengadakan forum di mana semua pelaku UMKM dapat terlibat untuk membahas rencana dan prioritas pengembangan UMKM merupakan bentuk partisipasi yang signifikan. Selain itu dalam menentukan rencana prioritas dan penggunaan dana menunjukkan bahwa keputusan terkait alokasi sumber daya tidak diambil secara sepihak. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan terkait dengan pengembangan UMKM tidak di ambil secara sepihak dan mencerminkan bahwa keputusan yang di ambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi.

Dalam wawancara dengan Ibu Parjiyanti selaku pelaku UMKM pengolahan '*Stik bawang*' bawhwasanya beliau menyampaikan,

“Pemerintah Kalurahan sangat melibatkan UMKM yang mau berkembang. Informasi juga cepat, kita juga ada grub UMKM yang Sriharjo, begitu ada informasi kita langsung diinfokan. Biasanya di infokan ke pengurus dulu langsung pengurus infokan ke grub yang semua UMKM Sriharjo gitu”. (Wawancara 28 juni 2024)

Dari wawancara dengan Parjiyanti selaku pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan sangat aktif mendukung perkembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). pemerintah Kalurahan sangat aktif melibatkan masyarakat tanpa terkecuali dan memastikan semua informasi yang terkait dengan pengembangan UMKM semua tersampaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang efektif dalam mendukung perkembangan UMKM.

Wawancara dengan Sutanto sebagai salah satu pelaku UMKM yang berjualan soto ayam, dalam wawancara di warung sotonya.

“ kalau ada musyawarah atau apa begitu saya diberitahu untuk hadir, terus kalau ada pesanan makanan itu dari kalurahan pesan di saya” (wawancara 25 juni 2024)

Hal ini mencerminkan bahwa keterlibatan dan dukungan dari pemerintah kalurahan mencerminkan prinsip partisipasi yang mendasari demokrasi. Tidak hanya melibatkan dalam proses musyawarah, pesanan makan dari kalurahan merupakan bentuk dukungan aktif dari pemerintah kalurahan kepada pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi langsung dalam ekonomi lokal dan memberdayakan UMKM dengan cara konkret dan langsung.

Wawancara dengan Damsikin (pelaku UMKM) di rumahnya beliau menyampaikan bahwa.

“pernah saya ikut pelatihan UMKM itu tiga tahun lalu, itu bagaimana cara mengemas dan memasarkan yang baik, tapi habis itu mandek selama tiga tahun gak ada keterusan, gak ada tindak lanjutnya sampai sekarang, gak tau dari mana” (Wawancara 18 juli 2024)

Dalam konteks demokrasi khususnya prinsip dasar partisipasi pernyataan dari Damsikin peneliti melihat bahwa mengikuti pelatihan tiga tahun lalu menunjukkan bahwa partisipasi UMKM dalam program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan mereka. Ini merupakan langkah awal yang baik dalam mendukung perkembangan mereka. Hal ini menunjukkan prinsip partisipasi yang memfasilitasi akses pengetahuan dan keterampilan. Namun, ketidakadaan tindak lanjut atau dukungan setelah pelatihan menunjukkan adanya celah dalam proses partisipasi. Dalam hal ini, ada mekanisme yang ideal untuk memastikan bahwa pelaku UMKM dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh, mendapatkan pelatihan

lebih lanjut, dan melanjutkan proses perkembangan mereka. Partisipasi yang efektif memerlukan dukungan berkelanjutan setelah pelatihan untuk memastikan bahwa UMKM dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi.

Sebagai tugas dan fungsi BamusKal secara umum adalah meningkatkan partisipasi, mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan yang di ambil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam wawancara dengan Tutik Nuryati BamusKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) beliau menyampaikan bahwa,

“Memang unsur masyarakat yang paling penting hadir baik pemerintah kalurahan, BamusKal sendiri, dari unsur LKD, LPMK ada karangtaruna, TPPKK itu semua harus hadir, kemudian dari unsur pendidikan, unsur agama pokoknya semua unsur yang ada di masyarakat kalurahan itu semua harus hadir karena di muskal itu semua harus hadir. Unsur yang diundang memang itu jadi semua elemen masyarakat dilibatkan”. (Wawancara 27 juni 2024).

Dari keterangan Tutik Nuryanti sebagai BamusKal dilihat dari prespektif partisipasi keterlibatan berbagai unsur masyarakat seperti pemerintah kalurahan, BamusKal, LKD, LPMK, karang taruna, TPPKK, serta unsur pendidikan dan agama menunjukkan upaya untuk memastikan partisipasi yang luas. Ini mencerminkan bahwa semua kelompok yang memiliki peran dan kepentingan diikutsertakan dalam proses musyawarah. Kehadiran berbagai unsur masyarakat dalam musyawarah merupakan langkah yang positif dan mencerminkan prinsip partisipasi yang menyeluruh. Hal ini memastikan bahwa pengambilan keputusan melibatkan masukan dari semua kelompok masyarakat, meningkatkan

trasparansi, akuntabilitas dan kolaborasi. Meskipun ada tantangan dalam koordinasi, keterlibatan yang luas memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terlebih khusus para pelaku UMKM.

Wawancara dengan Ratna Listiyani yang merupakan utusan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY yang memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UMKM melalui program desa Pereneur, beliau menyampaikan bahwa

“Yang tidak mengikuti pelatihan desa preneur tetap bisa mengikuti pendampingan. Karena pada saat pendampingan itu, kita tidak hanya membicarakan terkait dengan materi, tapi kita juga bisa melakukan konsultasi usaha. Kita sebenarnya ingin merangkul semua tapi memeing karena keterbatasan, seperti ini administrasi dan anggaran yang perlu diterapkan. Jadi, untuk pelatihan kita hanya untuk tigapuluh orang, pendampingannya boleh, semua boleh ikut di luar dari peserta pelatihan juga boleh. Siapa saja yang ikut pelatihan, kita dari Dinas berkolaborasi dengan teman-teman kalurahan tentunya yang lebih tau persi bagaimana UMKM yang ada di Sriharjo” (Wawancara 18 juli 2024)

Dari prinsip partisipasi dalam demokrasi pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan ini mencerminkan penerapan prinsip demokrasi yang baik dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses dukungan terhadap UMKM dan memastikan bahwa manfaat dari program dapat di akses oleh semua pelaku UMKM, meskipun ada batasan dalam pelaksanaan pelatihan. Program ini tetap berusaha untuk merangkul semua pelaku UMKM melalui pendampingan dan konsultasi yang terbuka untuk semua pelaku UMKM.

B. Transparansi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan UMKM

Transparansi dalam pengembangan UMKM berarti keterbukaan dalam semua hal terkait dengan pengembangan UMKM mulai dari proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan program sampai dengan proses pendanaan yang mempengaruhi UMKM. Dengan transparansi semua pihak terlibat mulai dari masyarakat, pelaku UMKM hingga Pemerintah Kalurahan serta pihak lain yang mendukung pengembangan UMKM. Hal ini dapat mengurangi potensi penyimpangan dan memastikan akuntabilitas dalam setiap tahap pengembangan UMKM.

Transparansi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM sangatlah penting, transparansi memastikan setiap proses pengambilan keputusan terbuka secara umum dan alokasi sumber daya serta pelaksanaan program dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas. Dengan adanya transparansi masyarakat terlebih khusus para pelaku UMKM dapat lebih percaya dan terlibat aktif dalam pengembangan yang dilakukan, sementara itu pemerintah dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mendukung pertumbuhan dan pengembangan serta kemandirian UMKM secara adil dan efektif.

Wawancara dengan Tutik Nuyati (BamusKal) Untuk menjalankan tugas dan Fungsi BamusKal dalam keterangannya beliau mengatakan

“Untuk Sriharjo ada Grub wa khusus terdiri dari penjual dari berbagai macam hasil masyarakat itu ada satu wadahnya disitu juga ada pemdesnya, ada Lurahnyaa dii situ semua saling terbuka. Dari situ saya bisa melihat bahwa disitupun terjadi transparansi antara

penjual dengan yang lain dengan pemerintah kalurahan”.
(Wawancara 27 juni 2024)

Dari pernyataan Tutik nuryati (BamusKal) Menunjukkan bahwa adanya wadah komunikasi dan forum semua pihak yang terlibat baik itu pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kalurahan bahkan Lurah terlibat secara langsung dan berkomunikasi secara terbuka. Hal ini mendukung adanya transparansi dari berbagai aspek baik itu kebijakan, program pembangunan, pelatihan dan kebutuhan UMKM.

Dalam wawancara dengan Parjiyanti (pelaku UMKM) beliau mengatakan bahwa

“ Dari pemerintah kan kita ada program desa preneur di kalurahan itu jadi semua informasinya masuk kesitu, dari pemerintah itu, lansia ada program desa prima, yang agak muda ada program desa pereneur, terus juga ada karangtaruna. Nanti informasi masuk ke forum atau grup jadi cepat menyebar, tidak pernah ketika ada informasi, itu tidak tersampaikan pasti tersampaikan dengan baik”.
(Wawancara 28 juni 2024)

Dari sudut pandang asas demokrasi yaitu transparansi dari pernyataan di atas peneliti melihat bahwa ada upaya untuk menyebarluaskan informasi secara efektif. Dalam konteks demokrasi, transparansi berarti informasi yang relevan dan penting-penting harus tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini para pelaku UMKM dalam perkembangannya.

Dari keterangan Parjiyanti, peneliti memahami bahwa akses informasi itu sangat mudah didapat, baik itu program pelatihan, pendampingan ataupun bantuan permodalan dan fasilitas ketika para pelaku UMKM berkeinginan untuk berkembang dan terlibat aktif dalam

forum-forum yang diadakan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi diterapkan dengan baik melalui kemudahan akses informasi, dukungan kepada UMKM dan keterlibatan dalam forum-forum. Ini mencerminkan upaya untuk memudahkan akses informasi untuk mendukung pengembangan UMKM secara langsung dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembuatan keputusan.

Dalam wawancara dengan Siti (penjahit) beliau menginformasikan bahwa

“Kalau transparansi kalurahan trasparan kalau ada apa-apa saya di beritahu, saya juga pernah diundang di musyawah di Kalurahan itu membahas soal UMKM. petugas kalurahan datang kasitau saya untuk hadir”. (Wawancara 28 juni 2024)

Keterangan dari Siti peneliti melihat bahwa kemudahan akses informasi dan transparansi di Kalurahan terjaga dengan baik karena informasi dan undangan untuk pertemuan disampaikan langsung kepada warga terlebih khusus kepada para pelaku UMKM. hal ini menunjukkan adanya keterbukaan dalam komunikasi antara pemerintah kalurahan dan masyarakat.

Damsikin (pelaku UMKM) dalam wawancara di kediamanannya beliau mengatakan bahwa :

“kalau trasparasi pemerintah kalurahan cukup transparan, pernah saya ikut pelatihan UMKM itu tiga tahun lalu, itu bagaimana cara mengemas dan memasarkan yang baik, tapi setah itu macet. Selama tiga tahun tindak lanjutnya sampai sekarang, tidak tahu dari mana. Saya pernah di panggil ke Kalurahan tapi membahas UMKMnya bukan menyentuh ke UMKM kecil, tapi dia fokusnya ke UMKM kelompok, kelompok ikan dibuat kuliner tapi yang mengelolah pihak Kalurahan sendiri. Sebenarnya ada pelatihan ini, bantuan ini, ada bantuan untuk pengembangan siapa yang tidak

mendukung. Ternyata ada tapi hanya untuk kelompok UMKM tertentu” (Wawancara 18 juli 2024)

Dalam wawancara dengan Damsikin salah satu pelaku UMKM yang bergerak di Pembuatan Kripik tempe, peneliti melihat bahwa penting bagi pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan meningkatkan komunikasi terkait dengan program-program untuk pengembangan UMKM, sehingga dapat membantu membangun kepercayaan dan keterlibatan serta kemauan dari pelaku UMKM, serta memastikan semua pelaku UMKM merasakan manfaat dari pengembangan yang di lakukan oleh Pemerintah Kalurahan itu sendiri.

Pemerintah Kalurahan juga penting untuk memastikan bahwa setiap program atau bantuan yang disediakan memiliki mekanisme yang jelas dan responsif terhadap kebutuhan dan masukan dari UMKM. transparansi yang baik bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga tentang mendapatkan umpan balik dari pelaku UMKM di dengar dan direspon dengan baik.

Wawancara dengan Titik Istiyawatun Khasanah, S.I.P beliau menyampaikan bahwa.

“Ketika ada bantuan keuangan khusus maka kemudian kewenangan dari proses merencanakan sampai dengan melaksanakan itu ada di Kalurahan, bagusnya dana keistimewaan itu, proposal itu semua dari kita jadi kerangka kegiatan, program-program itu semua dari desa yang menyusun kita, dan tentu saja proposal di susun oleh teman-teman forum UMKM, apa yang dibutuhkan dan seterusnya. Kita ajukan proposal, kemudian kita ajukan penganggaran lalu ada konsultasi. Kemudian diarahkan bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Jadi, kita dari konsep-konsep yang kita susun, kita presentasikan ke dinas koperasi lalu mana yang diacc. Kita difasilitasi rumah produksi dan seterusnya dan yang menentukan itu dari Kalurahan sendiri yang sebelumnya kita bahas di forum

UMKM. Mereka (Dinas Koperasi dan UKM) hanya mengarahkan kita tidak diintefensi. (Wawancara 28 juni 2024)

Dalam demokrasi prinsip transparansi dari pernyataan di atas dapat dilihat dari kewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan program berada di Kalurahan dengan penyusunan proposal dan kerangka kegiatan dilakukan oleh pihak kalurahan dan forum umkm. Transparansi dalam kontek ini berarti bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan melibatkan tingkat partisipasi yang tinggi.

Dengan kewenangan yang berada di Kalurahan ada kemungkinan besar bahwa keputusan dan recana lebih sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya sudah dibahas melalui forom-forum. Partisipasi katif dari forum-forum UMKM dalam penyusunan program menunjukkan adanya keterlibatan langsung dari pihak yang terkena dampak dari proses perencanaan. Hal ini mencerminkan transparansi karena dalam proses penyusunan poroposal dan menentukan kebutuhan, keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa keputusan tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang saja.

Wawancara dengan Gotro Raharjo dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa

“Semua kita mulai harus dengan mekanisme musyawarah Kalurahan, jadi seluruh masyarakat dipanggil nanti kan kita penganggran, biasanya akhir tahun kita musyawarah. Penganggarana biasaya kan untuk banyak hal. Salah satunya UMKM ini rata-rata perwakilan dari UMKM yang ada di Kalurahan semua di panggil memenuhi quorumnya itu kita bahas untuk kedepannya. Apa yang kita prioritaskan untuk BumDes dan UMKM itu kita bahas dalam musyawarah”. (wawancara 15 juli 2024)

Dari keterangan yang disampaikan oleh Gotro Raharjo peneliti melihat pernyataan tersebut menunjukkan upaya untuk menerapkan asas demokrasi yaitu transparansi. Hal ini dapat dilihat dari proses penganggaran yang melalui musyawarah, ini mencerminkan praktik yang mendukung demokrasi dengan memastikan bahwa pengambilan keputusan melibatkan berbagai pihak serta informasi terkait dengan penganggaran tersedia untuk semua pemangku kepentingan.

Proses musyawarah dengan mengundang seluruh UMKM dan masyarakat untuk membahas penganggaran ini mencerminkan upaya untuk penerapan asas demokrasi dengan menerapkan prinsip transparansi. Transparansi tercapai ketika seluruh informasi yang berkaitan dengan penganggaran dan perencanaan tersampaikan dengan jelas kepada semua pihak yang berkepentingan terlebih khusus para pelaku UMKM. Hal ini memungkinkan para pelaku UMKM dan masyarakat dapat memahami dan mengevaluasi persoalan anggaran yang di alokasikan dan dapat memahami mengapa prioritas tertentu di pilih sehingga pada praktik di lapangan tidak ada kesalahan informasi terkait program yang di jalankan.

Dengan keterlibatan dari berbagai pihak dalam musyawarah, hal ini mencerminkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Karena dari setiap keputusan yang berkaitan alokasi dana diambil dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat terlebih khusus para pelaku UMKM, yang membantu memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada di UMKM.

C. Keadilan Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM

Keadilan Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM merujuk pada upaya Pemerintah untuk memastikan bahwa Pelaku UMKM mendapatkan akses yang sama dan adil terhadap sumberdaya dukungan dan peluang yang di perlukan untuk berkembang. Hal ini pemerintah harus memastikan bahwa para pelaku UMKM memiliki akses yang setara dan adil dalam hal akses keuangan, kebijakan, pelatihan dan pengembangan, infrastruktur serta akses ke pasar sehingga para pelaku UMKM dapat berkembang dan mempunyai daya saing.

Pemerintah juga harus memastikan melibatkan UMKM dalam Proses pengambilan keputusan melalui konsultasi ataupun forum, baik itu forum musyawarah maupun forum kelompok UMKM untuk memastikan bahwa kebijakan yang di buat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi.

Dalam wawancara dengan Titik Istiyawatun Khasanah, S I.P, beliau mengatakan bahwa,

“Semua kita undang kita fasilitasi pada saat pelatihan, pada saat pertemuan untuk menyampaikan apa yang menjadi program-program mereka, apa yang menjadi kendala dan seterusnya yang itu kita rumuskan dalam kebijakan yang kita rumuskan dalam bentuk program dan juga di support oleh anggaran seperti itu, jadi forum anak-anak UMKM itu yang bergerak biasanya. Termasuk untuk fasilitasi ijin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), kemudian ijin usaha, sertifikasi halal, kemudian kita fasilitasi dan kita umumkan kepada teman-teman yang butuh dan kita dorong untuk mengurus ijin itu dan sekarang hampir semua punya”. (Wawancara 28 juni 2024)

Dilihat dari aspek keadilan wawancara di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan berusaha untuk mencapai keadilan dalam pengembangan UMKM dengan mengurangi ketimpangan terhadap akses terhadap informasi, pelatihan dan perizinan yang sering menjadi kendala terhadap UMKM. Keadilan berarti mencakup upaya untuk menyamakan peluang dan mengurangi kesenjangan dalam dukungan yang di berikan kepada UMKM.

Wawancara dengan Ratna Listiyani selaku petugas yang ditugaskan oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok UMKM di Sriharjo, beliau mengungkapkan bahwa,

“Dalam program ini kita hanya fasilitasi tiga puluh orang dalam pelatihan kita batasi, tapi yang tidak mengikuti pelatihan desa preneur tetap bisa mengikuti pendampingan. Karena pada saat pendampingan itu kita tidak hanya membicarakan terkait dengan materi, tapi kita juga bisa melakukan konsultasi usaha. Kita sebenarnya ingin merangkul semua tapi memang karena keterbatasan, dengan seperti ini administrasi dan anggaran yang perlu diterapkan jadi untuk pelatoha kita hanya untuk tigapuluh orang, pendampingannya boleh, semua boleh ikut di luar dari peserta pelatihan juga boleh. Siapa saja yang ikut pelatihan kita dari Dinas berkolaborasi dengan teman-teman kalurahan tentunya yang lebih tahu persis bagaimana UMKM yang ada di Sriharjo”.
(Wawancara 18 juli 2024)

Jika dilihat dari prespektif keadilan pernyataan di atas menunjukkan adanya kesetaraan akses dan partisipasi. Dalam hal ini program yang dijalankan melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY yang menunjukkan adanya partisipasi dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun pelatihan

hanya untuk 30 orang. Ada kebijakan lain yang memungkinkan semua pelaku UMKM yang tidak terlibat dalam pelatihan mendapatkan pendampingan dan konsultasi usaha.

Hal ini mencerminkan prinsip keadilan demokratis yang mementingkan kesempatan yang sama bagi semua pelaku UMKM yang tidak berkemampuan mendapatkan pelatihan langsung. Walaupun ada keterbatasan dalam jumlah peserta pelatihan program ini menunjukkan ada upaya untuk menerapkan prinsip keadilan dalam demokrasi dengan menyediakan akses yang luas melalui pendampingan dan konsultasi usaha dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Wawancara dengan Pak Gotro Raharjo, S.Si, beliau Menyampaikan :

“Kalau dari dana desa itu kan banyak yang kita susun (program kalurahan), salah satunya soal program UMKM rata-rata perwakilan dari UMKM di desa itu semua di panggil memenuhi quorumnya, kalau umkm sendiri itu dari BUM Desa, kita ada penyertaan modal, bagi hasil dan sebagainya. Yang jelas untuk binaan itu berkelanjutan, misalnya ada anggaran dari Desa Preneur setiap tahun kita fasilitasi yang di kembangkan sesuai arahan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kalau kita benar-benar kerja di bawah, dari sisi keadilan sendiri distribusi bantuan itu pasti banyak kendala disini butuh yang namanya sentuhan-sentuhan yang memang di UMKM itu gak bisa berdiri sendiri. Keadilan, rata-rata bantuan itu tidak bisa adil atau tidak, tapi istilahnya bagaimana kegiatan itu diprioritaskan, untuk usaha-usaha kecil kita jadikan satu itu kita ada wadahnya POLSRI (Pusat Oleh-oleh Sriharjo), trus kalau yang agak besar memang rata-rata kita promosi kita istilahnya membantu marketing untuk pesanan atau order dan sebagainya kemungkinan ada pameran kita juga memperkenalkan disana”. (wawancara 15 juli 2024)

Dari wawancara di atas peneliti melihat bahwa keadilan itu bukan tentang memberikan sumber daya secara merata, tetapi penting untuk mempertimbangkan bahwa keadilan itu bagaimana memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dari berbagai latar belakang atau jenis UMKM dan pendekatan yang memperhatikan keunikan dari berbagai jenis UMKM yang ada. Dari pernyataan Gotro peneliti melihat bahwa keadilan butuh perhatian khusus. Distribusi keadilan menyesuaikan berdasarkan kebutuhan spesifik UMKM.

Wawancara dengan Parjiyanti (Pelaku UMKM)

”Kita pasti pakai poling kalau ada apa-apa, tidak yang seperti otoriter, tidak ada pokoknya. Semua dilibatkan tidak ada yang mengambil keputusan sendiri. Kalau kita UMKM aktif itu semua informasi atau bantuan itu cepat kita dapat, kita mau buat surat izin usaha atau PIRT itu cepat selesai, itu kalau kita tidak bermalas-malasan”.(Wawancara 28 juni 2024)

Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip keadilan di terapkan melalui partisipasi aktif, transparansi, tanggung jawab, dan penolakan terhadap otoritarianisme. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pengembangan UMKM.

Keterangan yang diberikan oleh Susanto

“Kalurahan cukup adil kita atau saya itu pernah diundang untuk musyawarah ke kalurahan untuk membahas UMKM, dikasi pelatihan dan seterusnya itu saya lihat semua di undang”. (Wawancara 25 juni 2024)

Dari pernyataan Susanto, peneliti menilai bahwa Pemerintah Kalurahan berupaya untuk berlaku adil terhadap semua UMKM, dengan

melibatkan atau mengundang dalam forum musyawarah untuk membahas persoalan yang dihadapi UMKM. Selain itu, dengan adanya pelatihan diharapkan UMKM dapat berkembang dan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pelatihan ataupun program yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan

Pengalaman yang didapat oleh Pak Damsikin selaku Pelaku UMKM beliau dalam wawancaranya menyampaikan bahwa.

“program dari Pemerintah Kalurahan itu banyak, namun turun sampai ke bawah hampir maksimal itu 20 sampai 30%, yang terealisasi sampai ke bawah seperti penataan, apa itu karena terhambat di atas atau yang dibawah kurang mendorong, saya itu dari 2017 sampai sekarang 2024 belum tersentuh sama sekali, mungkin yang gak tau, khususnya saya belum kesentuh, (Wawancara 18 juli 2024)

Damsikin dalam keterangannya beliau mengungkapkan pengalaman yang kurang memuaskan, sepengalaman beliau bahwa program ataupun bantuan cenderung tidak efektif dalam mencapai UMKM tingkat bawah. Hanya sebagian kecil yang bisa mencapai target dia merasa belum merasakan manfaat langsung dari program-program tersebut selama bertahun-tahun. Hal ini mencerminkan dalam distribusi atau implementasi program ataupun bantuan dari Kalurahan, masih ada pelaku UMKM seperti dia yang tidak terlayani dengan baik.

Jika dilihat dari perspektif keadilan peneliti berkesimpulan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah kalurahan untuk melibatkan seluruh pelaku UMKM dalam seluruh proses pembuatan kebijakan ataupun program, implemenatasi dari program maupun kebijakan masih memiliki

tantangan. Ada ketidakadilan dalam dalam distribusi manfaat dimana beberapa Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mungkin belum merasakan akses atau manfaat yang sama dengan pelaku UMKM lainnya, seperti yang dirasakan oleh Pak Damsikin. Oleh karena itu, walaupun ada upaya untuk adil, tantangan utama adalah bagaimana mewujudkan distribusi yang merata dan efektif dari bantuan dan program kalurahan kepada semua pelaku UMKM.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang di lakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Impelementasi Asas Demokrasi Dalam Pengembangan UMKM di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM. Dari analisis yang sudah dilakukan peneliti berkesimpulan bahwa adanya komitmen dari pemerintah kalurahan terhadap prinsip partisipasi dalam pengembangan UMKM. hal ini terlihat dari komitmen Pemerintah Kalurahan dalam melibatkan berbagai pihak termasuk pelaku UMKM, serta mengakomodasi kebutuhan para pelaku UMKM. Selain itu, Pemerintah Kalurahan juga terlibat aktif dalam melibatkan UMKM melalui forum-forum, grub komunikasi seperti whasapp dan musyawarah.
2. Transparansi dalam pengembangan UMKM di Kalurahan telah di terapkan cukup baik, tercermin dalam keterbukaaan informasi terkait proses pembuatan kebijakan pelaksanaan program dan pendanaan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal pelaksanaan, tindak lanjut dari kebijakan atau program tersebut.

3. Pemerintah kalurahan menghadapi tantangan serius dalam distribusi keadilan bagi pelaku UMKM. salah satu masalah utamanya adalah ketidakadilan dalam distribusi manfaat, di mana beberapa UMKM belum memperoleh akses atau manfaat yang setara dengan pelaku UMKM lainnya, Dengan demikian, meskipun terdapat upaya untuk menciptakan keadilan, tantangan utama terletak pada upaya mendistribusikan bantuan atau program kalurahan yang merata dan efektif kepada seluruh pelaku UMKM.

B. Saran

Dari hasil dan temuan selama melakukan penelitian tentang bagaimana Impementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pengembangan UMKM di Klaurahan Sriharjo maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. Agar tidak terjadinya kekeliruan dalam penyaluran bantuan dan program, Pemerintah Kalurahan harus meningkatkan mekanisme komunikasi. Sehingga dalam penyampaian informasi dan distribusi bantuan atau program. Pemerintah kalurahan dapat memastikan bahwa setiap UMKM dari berbagai macam jenis mendapatkan perlakuan yang sama dan adil hal ini dapat membantu menghindar kesan bahwa hanya kelompok tertentu yang mendapatkan perhatian lebih sedangkan UMKM lainnya terpinggirkan.
2. Penguatan Forum dan kepengurusan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di setiap padukuhan, mengingat ini sebagai

wadah penting untuk penyaluran informasi. Pemerintah Kelurahan lebih aktif dalam mendorong kepengurusan UMKM disetiap padukuhan untuk terlibat aktif dalam proses pengembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnarita Siregar. (2020). Pergeseran Pinsip demokrasi ekonomi dalam pengelolaan perusahaan asuransi jiwa bersama bumiputera. *Jurnal Sosial Politik Dan Hukum Universitas Pasundan*.
- Asri Setiyani, Tri Yuliyanti, Dida Rahmadanik. 2022. "Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan, Kabupaten Sidoarjo. ULIL ALBAB: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 (3), 425-433, 2022 journal-nusantara.com
- Dewantara, R. (2019). Rekonseptualisasi asas demokrasi ekonomi dalam konstitusi indonesia, vol 7 (2014) hal. 195-209
- Dewi, S. R., Andari, A., & Masitoh, M. R. (2019). Peran Pelatihan Dan Workshop Bagi Peningkatan Motivasi, Inovasi Dan Kreativitas Pada Umkm Kerajinan Tangan Dari Manik-Manik. *KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 1(2), 59. <https://doi.org/10.30656/ka.v1i2.1509>
- Edi Suharto . didalam Tegur Teguh Santoso dkk. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Gabungan. *Transformasi* No. 32 Tahun 2017. Volume I.
- Endang Purwanti. Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Umkm Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Salatiga. *Jurnal Ilmiah Among Makarti*. Vol. 5. No 9 Tahun 2012.
- Ibid hal 58.
- Jerry RH Wuisang dkk. *Kewirausahaan Dan UMKM*. Penerbit. Yayasan Makaria Waya. 2019.
- Jimly Asshidiqqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektifisme dalam kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Masa Tiga demokrasi 1945-1980an), (Jakarta: PT. Ichtir Baru Van Hoeve, 1994)
- Joko Pramono, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, UNISRI Press, Percetakan kurnia Solo 2022.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, 2010, Bandung pt Remaja sodakarya.
- Maya Yusnita dan Dian Prihardini Wibawa. Menakar Peran Pemerintah dan Akademisi Terhadap Pengembangan UMKM. Vol. 5 No. 1 Januari 2020 Hal. 60-70.
- Novie Noordiana RY, Wilsna. *Manajenen UMKM Bagi Wanita*. Penerbit Pustaka Abadi 2019.

- Riyanthi idayu, Mohamad Husni, Suhandi. Strategi Pengembangan UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang banten. *Jurnal manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* vol 7 (2021).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Siti Aminah Caniago. Munculnya Neoliberalisme Sebagai Bentuk Baru Liberalisme. Tanpa tahun.
- Siti Nur Zalika (2018) berjudul “Demokrasi Desa dalam Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Desa” Vol. 3, No 2, April 2018.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2016.
- Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta 2017.
- Swasanany, Winantuningtyas Titi. 2013. Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru Di Indonesia (Perspektif Democratic Governance). *Kajian* Vol. 18 No.2 Juni 2013.
- Tata Strata Hufron, S. S. (2019). Ambang batas palemen (perlementiary thershold) dan asas demokrasi). *Jurnal AKRAB JUARA*, 4.
- Totok Tumangkar “*Economic Democracy on Micro Small and Medium Enterprises (UMKM) Regulation in Indonesia.*” *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 14, Issue 4 (December) 2017
- Yani Restiani Widjaja. (2018). Peranan Kompetensi SDM UMKM Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, Sumedang. *JURNAL ABDIMAS BSI*.
- Yuli Rahmini Suci. *Perkembangan Ukm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6 No. 1 Januari 2017.

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 tahun 2019, tentang pedoman kelembagaan urusan keistimewaan pada pemerintah kabupaten/kota dan kalurahan.

Sumber Internet

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2008-usaha-mikro-kecil-menengah>

<https://sriharjo.bantulkab.go.id/>

<https://tokosirejeki.com/>

LAMPIRAN
PANDUAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI ASAS DEMOKRASI DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Di Kelurahan Sriharjo, Kapanewan Imogiri, Kabupaten, Bantul, DIY

A. Identitas Narasumber

Nama :

Jenis kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

B. Daftar Pertanyaan

Implementasi Asas Demokrasi Dalam Pengembangan UMKM

1. Daftar Pertanyaan untuk Pemerintah Kalurahan.
 - a. Apa saja yang dilakukan kalurahan dalam mengelolah potensi dan pengembangan UMKM ?
 - b. Apa saja yang dilakukan dalam menhadapi persoalan UMKM ?
 - c. Bagaimana relasi atara para pelaku UMKM dan Kalurahan ?
 - d. Bagaimana kalurahan menciptakan keseimbangan bagi pelaku UMKM ?
 - e. Bagaimana kalurahan menghadapi mekanisme pasar yang terjadi di UMKM ?
2. Daftar pertanyaan untuk BamusKal
 - a. Bagaimana peran BamusKal dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan ?
 - b. Bagaimana BamusKal melihat relasi para pelaku UMKM dan pemerintah Kalurahan ?
 - c. Bagaimana BamuKal memastikan dalam Forum musyawarah semua bisa terlibat, dan memastikan di setiap proses pengambilan keputusan di lakukan secara terbuka ?

- d. Bagaiman Bamuskal melihat Pengembangan yang dilakukan pemerintah kalurahan terhadap UMKM?
 - e. Apakah BamusKal melakukan evaluasi yang berkaitan dengan pengembangan umkm ? bagaimana Prosesnya ?
3. Daftar pertanyaan untk pelaku UMKM
- a. Apa saja yang dilakukan kalurahan dalam mengelolah potensi dan pengembangan UMKM ?
 - b. Sarana dan prasarana apa saja yang di buat oleh Kalurahan dalam pengembangan UMKM ?
 - c. Bagaimana relasi atara para pelaku UMKM dan Kalurahan ?
 - d. Hal apa saja yang di lakukan kalurahan dalam mengatasi persoalan UMKM ?
 - e. Apakah kebijakan atau program yang di keluarkan kalurahan mampu menyetuh seluruh UMKM ?

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Titik Istiyawatun Khasanah, S.I.P (Lurah Sriharjo) 28 juni 2024



Wawancara dengan Ibu Tutik Nuryati (BAMUSKal) 27 juni 2024



Wawancara Deangan Ibu Parjiyanti (Pelaku UMKM) 28 juni 2024



Banner Iklan Produk Pak Damsikin (Pelaku UMKM)

Foto di ambil 18 juli 2024



Gedung POLSRI (Pusat Oleh-oleh Sriharjo)

Foto di ambil 18 juli 2024



Bebagai macam Produk UMKM yang di jual di POLSRI

Dokumentasi Pelatihan UMKM 16-18 juli 2024 oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui Program Desa Preneur.







LAMPIRAN
PANDUAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI ASAS DEMOKRASI DALAM PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Di Kelurahan Sriharjo, Kapanewan Imogiri, Kabupaten, Bantul, DIY

A. Identitas Narasumber

Nama :

Jenis kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

B. Daftar Pertanyaan

Implementasi Asas Demokrasi Dalam Pengembangan UMKM

1. Daftar Pertanyaan untuk Pemerintah Kalurahan.
 - a. Apa saja yang dilakukan kalurahan dalam mengelola potensi dan pengembangan UMKM ?
 - b. Apa saja yang dilakukan dalam menghadapi persoalan UMKM ?
 - c. Bagaimana relasi antara para pelaku UMKM dan Kalurahan ?
 - d. Bagaimana kalurahan menciptakan keseimbangan bagi pelaku UMKM ?
 - e. Bagaimana kalurahan menghadapi mekanisme pasar yang terjadi di UMKM ?
2. Daftar pertanyaan untuk BamusKal
 - a. Bagaimana peran BamusKal dalam pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan ?
 - b. Bagaimana BamusKal melihat relasi para pelaku UMKM dan pemerintah Kalurahan ?
 - c. Bagaimana BamusKal memastikan dalam Forum musyawarah semua bisa terlibat, dan memastikan di setiap proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka ?
 - d. Bagaimana BamusKal melihat Pengembangan yang dilakukan pemerintah kalurahan terhadap UMKM?
 - e. Apakah BamusKal melakukan evaluasi yang berkaitan dengan pengembangan umkm ? bagaimana Prosesnya ?

3. Daftar pertanyaan untuk pelaku UMKM
 - a. Apa saja yang dilakukan kalurahan dalam mengelolah potensi dan pengembangan UMKM ?
 - b. Sarana dan prasarana apa saja yang di buat oleh Kalurahan dalam pengembangan UMKM ?
 - c. Bagaimana relasi antara para pelaku UMKM dan Kalurahan ?
 - d. Hal apa saja yang di lakukan kalurahan dalam mengatasi persoalan UMKM ?
 - e. Apakah kebijakan atau program yang di keluarkan kalurahan mampu menyetuh seluruh UMKM ?

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Titik Istiyawatun Khasanah,
S.I.P (Lurah Sriharjo) 28 juni 2024



Wawancara dengan Ibu Tutik Nuryati (BAMUSKal)
27 juni 2024



Wawancara Deangan Ibu Parjiyanti
(Pelaku UMKM) 28 juni 2024



Banner Iklan Produk Pak Damsikin
(Pelaku UMKM)

Foto di ambil 18 juli 2024



Gedung POLSRI (Pusat Oleh-oleh Sriharjo)

Foto di ambil 18 juli 2024



Bebagai macam Produk UMKM yang di jual di POLSRI

Dokumentasi Pelatihan UMKM 16-18 juli 2024 oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY melalui Program Desa Preneur.









LURAH SRIHARJO

KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SRIHARJO

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK UMKM PADUKUHAN

SE-KALURAHAN SRIHARJO

LURAH SRIHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu mewedahi pelaku umkm perlu dibentuk Kepengurusan Kelompok Umkm;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sriharjo tentang Pembentukan Pengurus Kelompok UMKM Se-Kalurahan Sriharjo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
6. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH SRIHARJO TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK UMKM SE-KALURAHAN SRIHARJO.**
- KESATU : Membentuk Pengurus Kelompok UMKM Se-Kalurahan Sriharjo dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sriharjo

Pada tanggal : 28 November 2022

LURAH SRIHARJO,



TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UMKM PADUKUHAN MIRI

Ketua :

1. Sari
2. Yuni Lestari

Sekretaris :

1. Erna
2. Andini

Bendahara :

1. Sri Isnaini
2. Sri Widiastuti

Sie Pendampingan dan Pengembangan Usaha :

1. Istinganah
2. Tri Haryanti
3. Purwanti
4. Sri Hartuti

Humas :

1. Parmi
2. Maryati
3. Marjiyati
4. Ristan



TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UMKM PADUKUHAN PELEMADU

Ketua :

1. Jumiran
2. Sarjiono

Sekretaris :

1. Puji Astuti
2. Dwi Ernawati

Bendahara :

1. Kustinah
2. Surasih

Sie Pendampingan dan Pengembangan Usaha :

1. Puji Astuti
2. Bintoro
3. Dwi Pihanto

Humas :

1. Sri Herlina
2. Bargiyem
3. Saptuti



LURAH SRIHARJO,

TIK ISTIYAWATUN KHASANAH

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UMKM PADUKUHAN MIRI

Ketua :

1. Sukamto
2. Subardi

Sekretaris :

1. Umi Fatonah
2. Agus Waryadi

Bendahara :

1. Ari Nurhidayati
2. Joko Purwanto

Sie Pendampingan dan Pengembangan Usaha :

1. Bayuwati
2. Sumarmi
3. Wakidi
4. Nurul Muslimatun

Humas :

1. Suwarni
2. Elisa Setyasari
3. Bardiyem
4. Kartini

Sie Kelompok Usaha :

1. Musirin (Burung)
2. Sabari (Makanan)
3. Mariyah (Keripik)
4. Ikawati (Tempe)
5. Klumpuk (Ternak)



SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UMKM PADUKUHAN NGRANCAH

Ketua :

1. Isnandiyah

Sekretaris :

1. Hesti
2. Nani

Bendahara :

1. Sutri

Sie Pendampingan dan Pengembangan Usaha :

1. Muji

Humas :

1. Sulis
2. Siti Fatimah



TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UMKM PADUKUHAN MOJOHURO

Ketua :

1. Yatno
2. Basuki

Sekretaris :

1. Septi Wulandari
2. Ratna Wijayanti

Bendahara :

1. Dessi Anti
2. Suwandi

Sie Pendampingan dan Pengembangan Usaha :

1. Fitri Yuni
2. Nurul

Humas :

1. Wahyuni
2. Sumiyati



SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UMKM PADUKUHAN SOMPOK

Ketua :

1. Dwi Purwanto
2. Fendi

Sekretaris :

1. Murni
2. Endang

Bendahara :

1. Sudarsi
2. Parjiyanti

Sie Pendampingan dan Pengembangan Usaha :

1. Rismiasih
2. Indri

Humas :

1. Mujiyat
2. Mursinah



SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UMKM PADUKUHAN PENGKOL

Ketua :

1. Mahmudah
2. Khoirunisa

Sekretaris :

1. Siti Nur Rahmawati
2. Fatonah

Bendahara :

1. Sugiyanti
2. Ngajiyem

Sie Pendampingan dan Pengembangan Usaha :

1. Sugiyanti
2. Emilia

Humas :

1. Purwanti
2. Munawaroh



SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UMKM PADUKUHAN WUNUT

Ketua :

1. Mujirah
2. Leni

Sekretaris :

1. Nani
2. Sri

Bendahara :

1. Asih
2. Morinah

Sie Pendampingan dan Pengembangan Usaha :

1. Endah Fatmawati
2. Sri Wahyuni

Humas :

1. Muryani
2. Sarijah



SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UMKM PADUKUHAN JATI

Ketua :

1. Giyanti
2. Sarmidi

Sekretaris :

1. Tari
2. Nusi

Bendahara :

1. Retno
2. Wulan

Sie Pendampingan dan Pengembangan Usaha :

1. Desi
2. Yuli
3. Ninuk
4. Sinarsih

Humas :

1. Karyati
2. Boni
3. Suradi
4. Tunariyah
5. Sabari



SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UMKM PADUKUHAN DOGONGAN

Ketua :

1. Widi Kriyanta

Sekretaris :

1. Wulan

Bendahara :

1. Wiratmi

Sie Pendampingan dan Pengembangan Usaha :

1. Purwaningsih

Humas :

1. Nurul


LURAH SRIHARJO,
TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UMKM PADUKUHAN TRUKAN

Ketua :

1. Yani Wijaya
2. Faruk

Sekretaris :

1. Tarwiyati
2. Rusmilah

Bendahara :

1. Retno
2. Taufik

Sie Pendampingan dan Pengembangan Usaha :

1. Lisa
2. Fitri

Humas :

1. Toha
2. Yuli



SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UMKM PADUKUHAN KETOS

Ketua :

1. Puji Winarti

Sekretaris :

1. Ika

Bendahara :

1. Mujilah

Sie Pendampingan dan Pengembangan Usaha :

1. Purwanto

Humas :

1. Dwi

LURAH SRIHARJO,



TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK UMKM PADUKUHAN GONDOSULI

Ketua :

1. Murjilah
2. Winarti

Sekretaris :

1. Sulasmi
2. Siti Nur Janah

Bendahara :

1. Yuliani
2. Siti Muslimah

Sie Pendampingan dan Pengembangan Usaha :

1. Fatimah
2. Sarianti

Humas :

1. Heni Fitriyani
2. Wahyuni





LURAH SRIHARJO

KAPANEWON IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SRIHARJO

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DESA PRENEUR KALURAHAN SRIHARJO

LURAH SRIHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu mewedahi pelaku umkm perlu dibentuk Kepengurusan Desa Preneur;
b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sriharjo tentang Pembentukan Pengurus Desa Preneur Kalurahan Sriharjo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
6. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH SRIHARJO TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DESA PRENEUR KALURAHAN SRIHARJO.**
- KESATU : Membentuk Pengurus Desa Preneur Kalurahan Sriharjo dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sriharjo
 Pada tanggal : 1 April 2022

LURAH SRIHARJO,



TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

SUSUNAN PENGURUS DESA PRENEUR KALURAHAN SRIHARJO

NO	NAMA	JABATAN
1	PUJI WINARTI	KETUA 1
2	SITI NUR KHASANAH	KETUA 2
3	ANITA PUJI LESTARI	SEKRETARIS 1
4	NOVITA SARI	SEKRETARIS 2
5	ISTANTINI	BENDAHARA 1
6	YATI	BENDAHARA2
7	MEGIE ADITYA	ONLINE MARKETING
8	DEWI KURNIA SARI	PENGEMBANGAN USAHA
9	SARA CAHYA UTARI	PENGEMBANGAN USAHA
10	PARJIYANTI	PENDAMPINGAN
11	ALVI	PENDAMPINGAN
VOKAL POIN / KOORDINATOR UMKM PADUKUHAN		
1	ISTINGANAH	MIRI
2	GIANTI	JATI
3	DEWI SUMARSIH	MOJOHURO
4	ZULA	PELEMADU
5	SUKAMTO	SUNGAPAN
6	AGUNG	GONDOSULI
7	ASROFAH	TRUKAN
8	TARWIYATI	BUTUH
9	WIDI KRIYANTA	DOGONGAN
10	SITI NURJANAH	KETOS
11	ATMINI DAN WASIR	NGRANCAH
12	IDA DESTINA	PENGKOL
13	SAYUTI DAN MURNI	SOMPOK
14	ESTI WINARSIH	WUNUT

LURAH SRIHARJO,



TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO
amaj r3 amaa Sriharjo

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55782
Website : <https://sriharjo.bantulkab.go.id/> e-mail : desa.sriharjo@bantulkab.com

Nomor : 005 /
Perihal : UNDANGAN

Sriharjo, 05 Mei 2023

Kepada Yth.
Bpk /Ibu
Di Tempat

Dengan ini Lurah Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul,
mengharap kehadiran Bapak /Ibu pada :

Hari, Tanggal : Minggu, 07 Mei 2023
Jam : 16.00 WIB - selesai
Tempat : Nila Baba, Taman Girli Indah
Acara : *Syawalan dan koordinasi Preneur, BUMDes dan tim
Moccaf*

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Lurah Sriharjo
LURAH
SRIHARJO
[Signature]
TITIK ISTIYAWATUN K., S.I.P.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

Kapanewon Imogiri

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782

Tlp. -, Email : desa.sriharjo@bantulkab.go.id , website: http://sriharjo.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Tanggal : Minggu 7 Mei 2023
Acara : Syawalan dan koordinasi preneur, Bumdes dan tem Moceat
Tempat : Mla Baba Tamun Girli Indah

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	IHWAN ROY A	L	Staf	1
2	BTRO RAHARJO	L	Ulu-ulu	2
3	wati Kriyanta	L	amben	3
4	Murtinah	P	sompok	4
5	Tutik Nuryati	P	Jati	5
6	REYNO	P	Jati	6
7	Sara Cahya Utari	P	Demen	7
8	Eti Nurkhasanah	P	mini /preneur	8
9	Nani	P	preneur / jati	9
10	Inan Supitri	P	Staf	10
11	Titik Ikhwanstun K	P	Lung	11
12	BOA. H	L	BUMDES	12
13	Miyanto	L	- u -	13
14	Dewi Sumarsih	P	Mojohuro	14
15	Sarjijati	P	Mojohuro	15
16	Istantini	P	Mojohuro	16
17	ASROFATI	P	TRUKAN	17
18	Ruji Winarti	P	Ketos	18
19	NOVITA DITACH	P	Demen	19
20	Nurul Hestninggas	P	Pondamping	20
21	Alli	P	Mojohuro	21
22	Tarwifati	P	Bukuh	22
23	Giyanti	P	Demen	23
24	Anka puji Lestari	P	Demen	24
25	Istiansaman	P	Muri	25

Pelaksana Kegiatan

GOTRO RAHARJO, S.Si

**PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang : 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian

Kegiatan : 4.7.04 Pembentukan / Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Sub Kegiatan 01. Fasilitas Pengurus Desa Preneur dan Koperasi UMKM
Acara 01. Syawalan dan Koordinasi Preneur ,Bumdes, dan TIM Mocaff

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	07/05/2023	YU SUM	HERNITA	3402104904970001	030-211-012969	BPD	KONSUMSI	55	25,000	1,375,000
JUMLAH											1,375,000

Catatan:

1. Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 15 Mei 2023


GOTRO RAHARJO, S.S.i

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦲꦩꦺꦴꦂꦶꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦺꦤ꧀ꦱꦫꦶꦲꦫꦺ

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782

Tlp. -, Email : desa.sriharjo@bantulkab.go.id , website: http://sriharjo.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Waktu : Minggu 7 Mei 2023
Acara : Syawalan dan koordinasi preneur, Bumdes dan Tim Moccaf
Tempat : Nila Beta Taman @rli Indah

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Sayuti	P	Sompok	1
2	Tri Ningrih	P	Mojohuro	2
3	Esti Astarnah	P.	Warat	3
4	Parliyandi	P	Sompok	4
5	Murni	P.	Sompok	5
6	Muflih Nursyoboni	P.	Gondosuli	6
7	Nazulla	P	Pekemadu	7
8	Patonoh	P.	Pangkal	8
9	Dwi Setyaningsih	P	Miri	9
10	Ipa Destiana	P	Ponstaj	10
11	Nur Hidayat	P	Demren	11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25

Pelaksana Kegiatan

GOTRO RAHARJO, S.Si







**PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 **BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**
Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian**

Sub Kegiatan : 01. Fasilitas /
Pendampingan UMKM
Acara : 01. Pendampingan
Management Pemasaran
Moccaf

Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan / Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif**

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	08/05/2023	YU SUM	HERNITA	3402104904970001	030-211-012969	BPD	KONSUMSI	7	12,000	84,000
JUMLAH											84,000

MOJOHURO, 15 Mei 2023

Catatan:

- Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

GOTRO RAHARJO, S.S.I

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

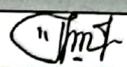
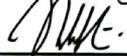
Kalurahan Sriharjo

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782

Tlp. -, Email : desa.sriharjo@bantulkab.go.id , website: http://sriharjo.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Waktu : 08 Mei 2023
Acara : Pendampingan pengelola moccaf.
Tempat : Kalurahan Sriharjo

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Tutik Nuryati	P	Jati	1 
2	Murtinah	P	Sempok	2 
3	Nurul Hestiningtyas	P	Pendamping	3 
4	Dwi Setyaningsih	P	mri	4 
5	Titik Istiyantika P	P	Luren	5 
6	Elwan Dwi Ashari	L	Sempok	6 
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Pelaksana Kegiatan


507100.R.

NOTULEN

Waktu : 08 Mei 2023
Acara : Pendampingan Pengelola Moccaf
Tempat : Kalurahan Sriharjo

Hasil Pendampingan

1. Menentukan Waktu Study Banding Ke Playen Gunung Kidul
2. Membuat Mekanisme Pemasaran
3. Merancang Desain Packaging
4. Mengumpulkan Koordinator Petani Singkong dari KWT



**PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang : 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian

Sub Kegiatan 01. Fasilitas Pengun
Desa Preneur dan
Koperasi UMKM
Acara 01. Koordinasi Prene
Management Moccaf

Kegiatan : 4.7.04 Pembentukan / Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
2	5.2.1.06	13-Apr-23	YU SUM	HERNITA	3402104904970001	030-211-012969	BPD	KONSUMSI	10	25,000	250,000
JUMLAH											250,000

Catatan:

1. Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 14 APRIL 2023


GOTRO RAHARJO, S.S.I



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

ꦏꦤꦒꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦶꦩꦺꦒꦶꦫꦶꦱꦫꦶꦗꦺ

Alamat : Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, D.I.Yogyakarta

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2023

Tempat : Kalurahan Sriharjo

Acara : Pendampingan pembuatan mie moceq.

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	Ikhwan Dwi Ashari	L	Sompok/staf	1
2	Tutik Nurhati	P	Jati	2
3	Murtinah	P	Sompok	3
4	Imam Syafii		Sedyu / Sotocasa	
5	SOTNO NANA RIZU	✓	Kujoran / Ulu-Ulu	5
6	EDHI. H	✓	GATEN / BUMDES	6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Pelaksana Kegiatan,



**PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 **BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**
Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian**

Sub Kegiatan : 01. Fasilitas
Pengurus Desa
Acara : 01. Koordinasi
Preneur dengan
Bumdes
02. Musyawarah
Pembukaan Pasar
Ramadhan

Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan / Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif**

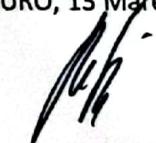
Sumber Dana : DDS PDP.

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	27 Februari 2023	YU SUM	HERNITA	34021049 04970001	030-211- 012969	BPD	KONSUMSI	15	25,000	375,000
2	5.2.1.06	11 Maret 2023	YU SUM	HERNITA	34021049 04970001	030-211- 012969	BPD	KONSUMSI	8	25,000	200,000
JUMLAH											575,000

Catatan:

- Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 13 Maret 2023


GOTRO RAHARIO.,S.S.i

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

ꦏꦁꦸꦁꦠꦸꦩꦲꦁꦶꦱꦸꦫꦺꦴꦏꦺꦴꦩꦶꦂ

Alamat : Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, D.I.Yogyakarta

DAFTAR HADIR

Tanggal : Kamis 23 Februari
Tempat : Kalurahan Sriharjo
Acara : Koordinasi BUMDes dengan Desa Preneur.

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	IKHWAN DWI AHARI	L	staf	1
2	Istantini	P	Mojohuro	2
3	Muflih Nursyabani	P	Gondosuli	3
4	MIYANTO	L	keperan	4
5	EPHI. H	L	ERTEN	5
6	Nur Zaitun	P	staf	6
7	Titik Ispijawanti K.	P	Lurah	7
8	Kusworo	L	fampole/cantik	8
9	BOTRONA HARJO	L	Kusore / Ula-Ula	9
10	Puji Winarti	P	fotos	10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Pelaksana Kegiatan,

BOTRONA HARJO

23 FEBRUARI 2023 KOORDINASI BUMDES



NOTULEN

ari, Tanggal : Kamis, 23 Februari 2023
Tempat : Ruang Rapat Kalurahan Sriharjo
Jam : 13.00 WIB

Hasil Rapat Koordinasi Preneur dengan BUMdes:

1. Membuat Koordinasi setiap bulan antara Preneur dan Bumdes tentang pengelolaan Showroom UMKM
2. Membuat Koperasi Preneur
3. Bekerja Sama antar koperasi ,preneur, dan Bumdes
4. Mengadakan Pameran di Imogiri dan Bulan Ramadhan

Notulis



IKHWAN DWI ASHARI

**PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 **BIDANG.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**
Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha ekonomi Produktif**

Sub Kegiatan : 01. Fasilitasi Pengurus Desa Preneur dan Koperasi UMKM
Acara : Koordinasi Sertifikasi Halal
Sumber Dana : DDS

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL	JUMLAH	JUMLAH DITERIMA	Ket Transaksi
			NOTA	NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK							
1	5.2.1.06	19-Jun-23	YU SUM	HERNITA		30211012969	BPD	Snack	12	25.000	300.000			
JUMLAH														

Catatan:

- Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 21 JUNI 2023
PELAKSANA KEGIATAN,


GOTRO RAHARJO, S.Si

KANTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

Kemasyarakatan

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782
Tlp. -, Email : desa.sriharjo@bantulkab.go.id , website: http://sriharjo.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Waktu : Senin, 19 Juni 2023.
Acara : Koordinasi Sosialisasi Halal.
Tempat : Kalurahan Sriharjo

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Sayuti	P	Sompok 7	1
2	Rufmini Wubndori	P	Demi jati Pt 02	2
3	Robiatul Adawiyah	P	Demi Jati Pt 01	3
4	SURASIH	P	Pelamabu Pt 03	4
5	Kaminah	P	Mojohuro	5
6	R. YANTI	P.	Dogongan.	6
7	Sumniyah	P	Miri	7
8	Ikhwan Dwi Ashari	L	COMPOK	8
9	GOTRO RAHARJO	L	Ulu-Ulu	9
10	Nur Aini	P	Kamucumber	10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25

Pelaksana Kegiatan

GOTRO RAHARJO, S.SI



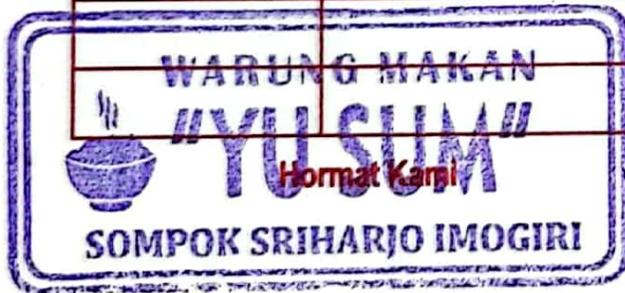
Catering Yu Sum

19 Juni 2023

TUAN
TOKO

Alamat : Sompok, Sriharjo, Imogiri, Bantul

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
12	Nasi Box + snack	@ 25.000	300.000
			}
		Jumlah Rp.	300.000
		DP.	
		Sisa Rp.	



Tanda Terima

(.....)

(.....)



NOTULEN

Hari, Tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Tempat : Ruang Rapat Kalurahan Sriharjo
Jam : 13.00 WIB

Persyaratan Sertifikat Halal

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Fotokopi KTP
3. Daftar Riwayat Hidup
4. Salinan Sertifikat Penyelia Halal dan Salinan Keputusan Penyelia Halal
5. Nama dan Jenis Produk
6. Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan
7. Proses Pengelolaan Produk
8. Dokumen Sistem Jaminan Halal

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Sub Kegiatan : 02. Fasilitasi Pendampingan UMKM

Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**

Acara : Snack

Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha ekonomi Produktif**

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL	JUMLAH	JUMLAH DITERIMA	Ket Transaksi
			NOTA	NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK							
1	5.2.1.06	18-Jul-23	YU SUM	HERNITA		30211012969	BPD	Snack	15	12,000	180,000			
JUMLAH														

Catatan:

1. Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 20 Juli 2023
PELAKSANA KEGIATAN,


GOTRO RAHARJO, S.Si

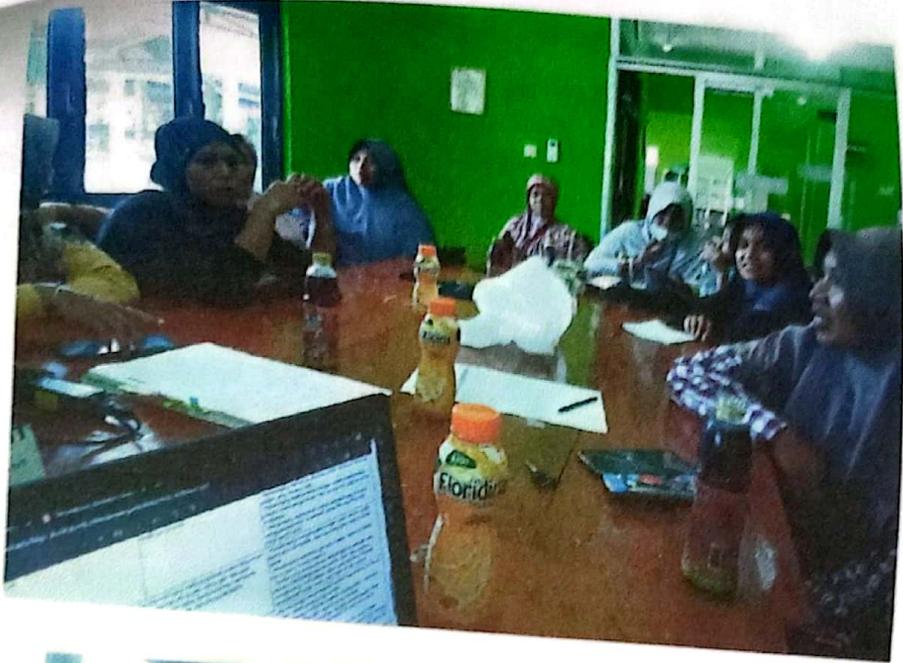
Waktu : Rabu. 18 Juli 2023.
Acara : Pendampingan UMKM preneur.
Tempat : kalurahan sriharjo

DAFTAR HADIR

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Etik Rogut			
2	Dewi Sumarsih			1 <i>[Signature]</i>
3	Sarjizaki	P	Anggota	2 <i>[Signature]</i>
4	Dewi Kurniasari	P	Anggota	3 <i>[Signature]</i>
5	Anita puji lestari	P	Anggota	4 <i>[Signature]</i>
6	REINO	P	"	5 <i>[Signature]</i>
7	ASPI OFATI	P	"	6 <i>[Signature]</i>
8	Parjiyanti	P	"	7 <i>[Signature]</i>
9	widi Krayanta	L	"	8 <i>[Signature]</i>
10	Nurul Hestiningtyas	P	Pendampingan	9 <i>[Signature]</i>
11	ikhwan Dwi Ashari	L	staf	10 <i>[Signature]</i>
12	Desi	P		11 <i>[Signature]</i>
13				12
14				13
15				14
16				15
17				16
18				17
19				18
20				19

Pelaksana Kegiatan

[Signature]



**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 **BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**
Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian**

Sub Kegiatan : 01. Fasilitas Pengurus
Desa Preneur dan
Koperasi UMKM
Acara : Koordinasi Management
Produksi Mocaff

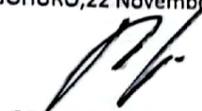
Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan / Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif**

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	19-Nov-23	YU SUM	HERNITA	3402104904970001	030-211-012969	BPD	KONSUMSI	15	25,000	375,000
JUMLAH											375,000

Catatan:
1.

MOJOHURO, 22 November 2023


GOTRO RAHARJO, S.S.I

DAFTAR HADIR

2023.
 koordinasi management produksi
 rumah produksi

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Rwi Sunarsh.	P		1
2	Siti rukyati	P		2
3	Sinarsih.	P	Jati	3
4	Nurul Hestiningtyas.	P.	Pandong.	4
5	Supinah.	P.		5
6	ASROFAN	P	MOJOKURO	6
7	Sardiyoti	P	mojokuro	7
8	Hawan Dwi Astari	P	Sompok.	8
9	Giyatmi	P.		9
10	nining.	P	Palemadu	10
11	Jamilah	P	Palemadu.	11
12	Tutik.	P	Amren.	12
13	Murtinah.	P	Sompok	13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Pelaksana Kegiatan





SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang : 4 BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian

Sub Kegiatan : 02. Fasilitas /
 Pendampingan UMKM
Acara : Pendampingan dan
 Koordinasi Laporan
 Penjualan barang
 Shoroom

Kegiatan : 4.7.04 Pembentukan / Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha
 Ekonomi Produktif

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
2	5.2.1.06	23-Nov-23	YU SUM	HERNITA	34021049 04970001	030-211- 012969	BPD	KONSUMSI	10	25,000	250,000
JUMLAH											250,000

Catatan:

1. Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
 Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 24 November 2023


 GOTRO RAHARJO., S.S.i



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

annuzammas

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782
Tlp. -, Email : desa.sriharjo@bantulkab.go.id , website: http://sriharjo.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Waktu : 23 November 2023
Acara : Koordinasi Penjualan produk
Tempat : Warung Makan Yu Sum Imogiri

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	RETNO	P	Anggota	1
2	Istingamah	P	Anggota	2
3	Tarwiyati	P	-	3
4	Istantini	P	"	4
5	Dewi Sumarsih	P	"	5
6	ASROFATI	P	"	6
7	Intan	P	"	7
8	Ikhwon Dwi Ashari	L	Staf	8
9	Eto			9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Pelaksana Kegiatan



Catering Yu Sum

Alamat : Sompok, Sriharjo, Imogiri, Bantul

....., 20

TUAN
 TOKO

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
10	Nasi Box	25.000	250.000

Hormat Kami

Tanda Terima

(.....)

(.....)

WARUNG MAKAN
 SOMPOK SRIHARJO IMOGIRI

Jumlah Rp. 250.000
 DP.
 Sisa Rp.

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 **BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**

Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian**

Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan / Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi P1 Sumber Dana : PBP**

Sub Kegiatan 01. Fasilitasi
Pengurus Desa
Preneur dan
Koperasi
UMKM

Acara Koordinasi
Pengurus

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	05-Dec-23	YU SUM	HERNITA	3402104904970001	030-211-012969	BPD	KONSUMSI	60	25,000	1,500,000
JUMLAH											1,500,000

MOJOHURO, 07 Desember 2023

Catatan:

1. Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer



GOTRO RAHARJO.,S.S.i

DAFTAR HADIR

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Giyanti	P	Jati	1
2	Pawli kurniasari	P	Pelama du	2
3	Siti Nurkhasanah	P	Miri	3
4	Istingmah	P	Miri	4
5	Novita Sari	P	Jati	5
6	Dwi setyaningsih	P	Miri	6
7	Murtinah	P	Sompok	7
8	Sarjijati	P	Mojohuro	8
9	Giyanti	P	PELEMAN DU	9
10	Jumlah	P	Pelama du	10
11	Sayuti	P	Sompok 07	11
12	Istamini	P	Mojohuro	12
13	Tri Ningsih	P		13
14	EDHI. H	L	GATEN	14
15	Ikhwan Awi Ashari	L	Sompok	15
16	Titik Istyaningsih	P	Sompok	16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25

Pelaksana Kegiatan





Catering Yu Sum

Alamat : Sompok, Sriharjo, Imogiri, Bantul

....., 20

TUAN
TOKO

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH

Hormat Kami

Tanda Terima



Jumlah Rp.

DP.

Sisa Rp.

KAPANEWON IMOGIRI
KALURAHAN SRIHARJO

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782
desa.sriharjo@bantulkab.go.id, website: http://sriharjo.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Dewi Apriani	P	Gondosul.	1
2	Suparti	P	Gondosuli	2
3	Purwanti	P	Kingskol	3
4	Kegayiyem	P	Perkokol	4
5	WINTOLO	L	RT 07	5
6	Murtinah	P	Sompok.	6
7	Sahesni	P.	Pelernadu	7
8	Ayi Akhi H	P	Pelernadu	8
9	Kurniasih Mui P	P	Miri Rt 02	9
10	Ari Suryati	P	Mojohuro	10
11	Bayuwati	P	Sungapan	11
12	Suprapti	P	Sungapan	12
13	Nur Latifah	P	Sompok	13
14	Rismiasih	P	Sompok	14
15	Slamat	L	Mojohuro	15
16	Walidn	L	- " -	16
17	Mulyoni	P	Trukan	17
18	Endarsih	P	Trukan	18
19	Pur yani	P	Jati	19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25

Pelaksana Kegiatan

KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782
Email : desa.sriharjo@bantulkab.go.id , website: http://sriharjo.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

No	Nama	LIP	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Ikhwan Dewi Aheri	L		
2	Dewi Kurniasari	L	gaj.	1
3	Miyanto	P	Preneur	2
4	Botto Reherje	L	BumDes	3
5	Jumilah	L	Ulu-Ulu	4
6	Tutik Nurhati	P	Tim Mij mocaF	5
7	Tarwifati	P	Tim Moe mocaF	6
8	Tri Ningsih	P	Preneur	7
9	Navita Sari	P	Preneur	8
10	Sayuni	P	Preneur	9
11	REHO	P	Preneur	10
12	AsrofaH	P	preneur	11
13	Istantini	P	preneur	13
14	Giyanti	P	Preneur	14
15	Dwi Setyaningsih	P	Tim mocaF	15
16	Siti Mukhasamah	P	preneur	16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33



**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 **BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**

Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian**

Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan / Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif**

Sub Kegiatan

Acara

Sumber Dana

01. Fasilitas
Desa Preneur dan
Koperasi UMKM

Koordinasi Pembentukan
Panitia Launching Rumah
Produksi

: PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	01-Dec-23	YU SUM	HERNITA	3402104904970001	030-211-012969	BPD	KONSUMSI	20	15,000	300,000
JUMLAH											300,000

Catatan:

1.

Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-

Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO,01 Desember 2023


GOTRO RAHARJO.,S.S.i

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

Desa Sriharjo

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782

Email : desa.sriharjo@bantulkab.go.id , website: http://sriharjo.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Waktu : Jum'at 01 Desember 2012.
Acara : Koordinasi pembentukan pengurus launching rumah produksi
Tempat : Rumah produksi Mojop.

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Tutik Nuryati	P		1
2	GIRATMA	P.		2
3	Jumilah	P		3
4	Dwi Setyaningsih	P		4
5	Dewi Sumarsih	P		5
6	Istingmah	P		6
7	Giyanti	P		7
8	RENO	P		8
9	SITI MURKHASANAH	P		9
10	Tarwi-yati	P		10
11	Sayuti	P		11
12	Dewi Kurniasari	P		12
13	ASROPAH	P		13
14	Istantini	P		14
15	Sarjireti	P		15
16	EDHI. H	L		16
17	S. Swanto	L		17
18	Sofro Raharjo	C	Ulu-Ulu	18
19				19
20				20

Pelaksana Kegiatan

Catering Yu Sum

Alamat : Sompok, Sriharjo, Imogiri, Bantul

....., 20

TUAN
TOKO

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
20	snack .	15.000	300.000

Hormat Kami

Tanda Terima

(.....)

(.....)

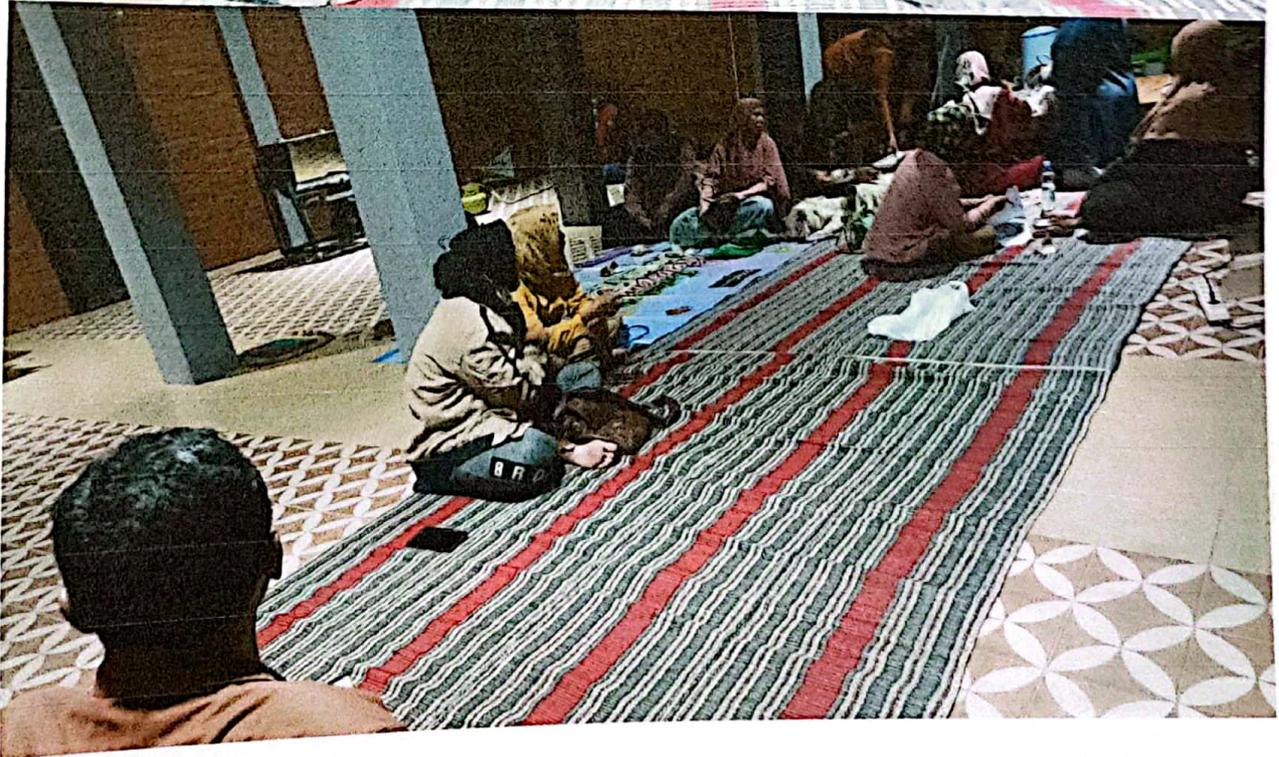
WARING

Jumlah Rp. 300.000

DP.

Sisa Rp.

SOMPOK SRIHARJO IMOGIRI





**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian

Sub Kegiatan : 02. Fasilitas /
Pendampingan UMKM
Acara : Pendampingan dan
Koordinasi dengan
Bumdes tentang
Pemindahan Showroom
UMKM

Kegiatan : 4.7.04 Pembentukan / Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha
Ekonomi Produktif

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
2	5.2.1.06	08-Nov-23	YU SUM	HERNITA	34021049 04970001	030-211- 012969	BPD	KONSUMSI	13	25,000	325,000
JUMLAH											325,000

MOJOHURO, 13 November 2023

Catatan:

1. Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer


GOTRO RAHARJO, S.S.i

*2 kegiatan -
1. koordinasi
2. konsumsi
pemindahan
showroom*

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

amngzamaa Zamaa

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782
Tlp. -, Email : desa.sriharjo@bantulkab.go.id , website: <http://sriharjo.bantulkab.go.id>

Waktu : Rabu. 08 November
Acara : pendampingan dan koordinasi dg Bumdes
Tempat : kal Sriharjo

DAFTAR HADIR

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Ikhsan Dwi Anari	L	staf	1
2	Giyanti	P		2
3	ASROPAH	P		3
4	Sarjizaki	P		4
5	Istantini	P		5
6	Zumilah	P		6
7	Dwi Setyaningsih	P		7
8	Murtinah	P		8
9	GIYATMI	P.		9
10	Siti Mulkhasanah	P	Preneur	10
11	Miyanto	L	Bumpet	11
12	GOTRO RAHARJO	L	Ulu-ulu	12
13	EDHI. H.	L	BUMDES	13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Pelaksana Kegiatan



**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 **BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**

Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian**

Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan / Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif**

Sub Kegiatan : 01. Fasilitasi Pengurus Desa Preneur dan Koperasi UMKM
Acara : Koordinasi Lounching Rumah Produksi

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	29-Nov-23	YU SUM	HERNITA	3402104904970001	030-211-012969	BPD	KONSUMSI	20	25,000	500,000
JUMLAH											500,000

Catatan:
1.

Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 30 November 2023


GOTRO RAHARJO., S.S.i

29 NOV 2023.
 Acara : Koordinasi Lanching Rumah Produksi
 Tempat : Lanching (Shoroom umkm).

DAFTAR HADIR

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Tarwi-fati			
2	Iclinganzah	P		
3	Dewi Karmiasari	P		1/KB
4	Tri Ningsih	P		2 (Dy)
5	Istantini	P		3 [Signature]
6	ASROPAH	P		4 [Signature]
7	Sarjyati	P		5 [Signature]
8	Sayuti	P		6 [Signature]
9	RETNO	P		7 [Signature]
10	Tulik Nuryati	P		8 [Signature]
11	SITI MURKHASANAH	P		9 [Signature]
12	GOTRO RAHARJO	P		10 [Signature]
13	EDHI . H	L	Ulu-Ulu	11 [Signature]
14	Miyanto	L	BUNDES	12 [Signature]
15	Ikhwan Dwi Ashari	L	[Signature]	13 [Signature]
16				14 [Signature]
17				15 [Signature]
18				16
19				17
20				18
21				19
22				20
23				21
24				22
25				23
26				24
27				25
28				26
29				27
30				28
				29
				30

Pelaksana Kegiatan

Handwritten text on the wall, partially visible and upside down, including the words "Kebijakan" and "Kebijakan".



EMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

ro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782
sriharjo@bantulkab.go.id , website: http://sriharjo.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Agustus 2013.
Bulan Doa Bersama pengurus proneur dan Bundes
Produksi MOCAP.

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Iemi	P	Ondosul	1
2	Tiwik L	P	Kelos	2
3	Intan	P	Miri	3
4	Tini	P	slajakus	4
5	Surat	P	2-21	5
6	Lilis sutrisni	P	DOBONGAN	6
7	Puji Winarti	P	Ketos	7
8	Giyatna	P	pelomadu	8
9	Dwi Setyaningsih	P	MIRI	9
10	Tutik Nurhati	P	gati	10
11	Anita puji lestari	P	Demen	11
12	SITI nurkhasarah	P	Miri	12
13	Istantini	P	Mogdureo	13
14	murtinah	P	Sompok	14
15	Nur Hrdhayut	P	Demen	15
16	Yesika M	P	SOMPOK	16
17	Nur Zakiah	P	Sompok	17
18	pito	P	Demen	18
19	Sauudi	P	compole	19
20	Triyono	L	Sompok	20
21	Maryono	L	wunuf	21
22	Suparjono	L	kejon	22
23				23
24				24
25				25

Pelaksana Kegiatan

EMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

ꦏꦁꦸꦫꦲꦲꦶꦫꦶꦗꦺꦴꦫꦺꦴꦩꦶꦂꦶꦏꦧꦸꦛꦏꦁ

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782

Email : desa.sriharjo@bantulkab.go.id , website: http://sriharjo.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Irisworo	L	Caru	1
2	SUDHANTO	L	PARANSA	2
3	Wahyono	L	Bhabinkamtib	3
4	Sudaisono	L	pengantar	4
5	Rugito	C	Mojohuro	5
6	Sugiman	L	afputah	6
7	Wintolo	L	ngentale	7
8	SULSTJO P	L	Dukuh Mojohuro	8
9	JUMIDI	L	Mojohuro RT 06	9
10	Mmyanto	L	pelemoro	10
11	Subardijana	L	Mojohuro	11
12	EDHI. H	L	BUMDES	12
13	Sabari	C	RT.	13
14	Dewi Kurniasari	P		14
15	Giyanti	P		15
16	Istingmah	P		16
17	Sarjyadi	P		17
18	Dewi Sumasih	P		18
19	RETNO	P		19
20	ASROPAH	P		20
21	Tri Ningsih	P		21
22	Terwiyati	P		22
23				23
24				24
25				25

Pelaksana Kegiatan

[Handwritten Signature]

Catering Yu Sum

Alamat : Sompok, Sriharjo, Imogiri, Bantul

22 Sep 2023

TUAN
TOKO

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
68	Nasi Box + snack	@25.000	1.625.000



Hormat Kami

Tanda Terima

(.....)

(.....)

Jumlah Rp. 1.625.000

DP.

Sisa Rp.

Pemerintah Kabupaten Bantul
Kapanewon Imogiri
KALURAHAN SRIHARJO

Sriharjo, 20 September 2023

UNDANGAN

Kepada Yth
Bpk/Ibu
di tempat

Dengan ini Lurah Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul
mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada :

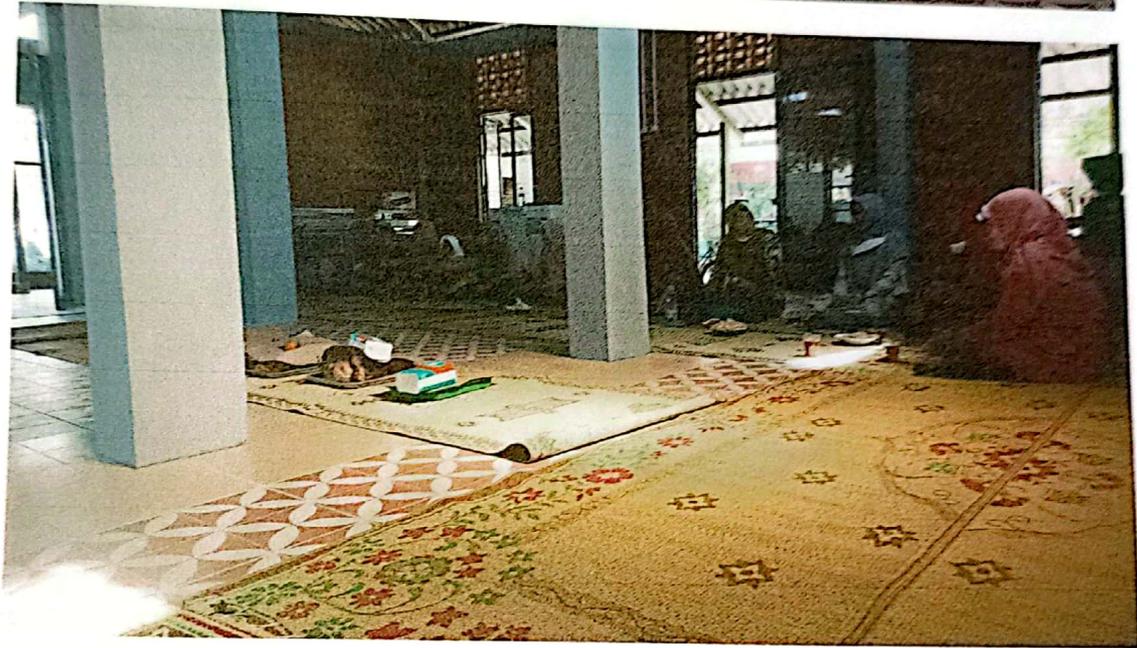
Hari, Tanggal	Jum at, 22 September 2023
Jam	13.00 WIB - selesai
Tempat	Rumah Produksi Mocaff (Eks Pasar)
Acara	Doa Bersama Pembukaan Rumah Produksi

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih

Lurah Sriharjo
LL. 0241
SRIHARJO

TITIK ISTIAWATUN K. S.I.P.





**PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 **BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**
Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian**

Sub Kegiatan : 01. Fasilitasi Pengurus
Desa Preneur dan
Koperasi UMKM
Acara : Koordinasi Preneur
tentang online Marketing

Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan / Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif**

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	01-Nov-23	YU SUM	HERNITA	3402104904970001	030-211-012969	BPD	KONSUMSI	20	15,000	300,000
JUMLAH											300,000

Catatan:

1.

Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 03 November 2023


GOTRO RAHARJO, S.S.i

KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

Kapanewon Imogiri

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782

Tlp. -, Email : desa.sriharjo@bantulkab.go.id , website: <http://sriharjo.bantulkab.go.id>

DAFTAR HADIR

Waktu : 01 Nov 2023
Acara : koordinasi online marketing.
Tempat : kal sriharjo

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Siti Nurkhasanah	P	Preneur / mini	1
2	Sinarsih	P	Anggota demen	2
3	Istainini	P	Peneur / mojhuro	3
4	Siti rukyati	P	miri 03	4
5	Nurul Hestiningtyas	P	Pendampingan	5
6	ASROFAT	P	TRUKAR	6
7	Dewi Kurniasari	P	Gaten	7
8	Sajiyati	P	Mojohuro	8
9	Sayuti	P	Sompok	9
10	Giyanti	P	Demen	10
11	RAHMAT	L	PANGGANG	11
12	Botro Rakarjo	L	Ulu-Ulu	12
13	Ikhwan Pui Ashari			13
14	Pujiyanti	P	Sompok	14
15	Petro	P	fati	15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Pelaksana Kegiatan

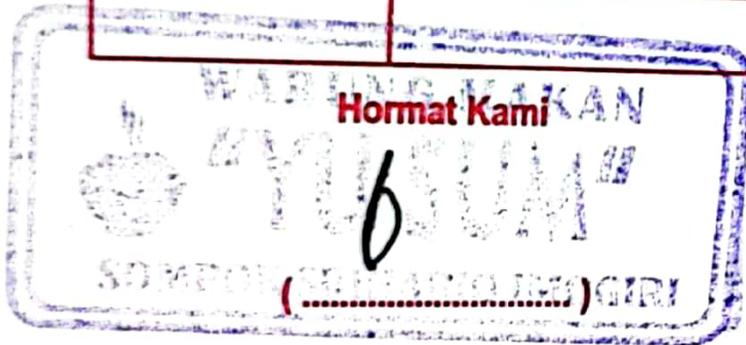
Catering Yu Sum

Alamat : Sompok, Sriharjo, Imogiri, Bantul

01 NOV 20 23

TUAN
TOKO

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
20	snack	@ 15.000	300.000



Tanda Terima
(.....)

Jumlah Rp. 300.000
DP.
Sisa Rp.





**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 **BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**
Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian**

Sub Kegiatan : 02. Fasilitasi /
Pendampingan UMKK
Acara : Pendampingan Umkm
dan Koordinasi tentang
mekanisme Pameran di
JCM tgl 13.14.15

Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan / Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok
Usaha Ekonomi Produktif**

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	05-Oct-23	YU SUM	HERNITA	34021049 04970001	030-211- 012969	BPD	KONSUMSI	20	12,000	240,000
JUMLAH											240,000

MUNINGIRO, 10 Oktober 2023

Catatan:

1. Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

*konsumsi
foto dan
koordinasi*



PELATIHAN DESA- PRENEUR MODEL BLANGKON



Pameran Gelar Potensi Desa Preneur di JCM tgl 13,14,15

- ① Minimal masing-masing desa menampilkan 2 UKM, dgn ketentuan
 - Bisa 2 shift
 - Produk kyat / unggulan desa utk dijual di toko ritail
 - Legalitas lengkap (produk makanan)
 - Label menarik
 - Kemasan menarik
 - utk produk terjamin dipayakan kualitas produk menarik dan terdapat label
 - Jangan sampai ada produk dgn "stapler"
 - Diprioritaskan belum lolos kurasi YIA
- ② Pendamping melakukan koordinasi dgn pemka dan kelompok utk kurasi dim jngka waktu 1-7 oktober '23
- ③ ~~Dilaksanakan~~ Dilaksanakan zoom meet dgn calon peserta pameran pd tgl 8 oktober '23
- ④ Dalam jangka waktu 1-7 oktober diharapkan pendamping memiliki database utk beserta daftar produk yg akan dipamerkan.
- ⑤

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦲꦩꦺꦴꦂꦶꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦶꦫꦶꦗꦺ

Mojohero, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782

Email : desa.sriharjo@bantulkab.go.id , website: http://sriharjo.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

05. Oktober 2022
koordinasi mekanisme pameran di jema.
bal sriharjo

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Sinarsh	P		1
2	Siti rukyati	P		2
3	RTTB	P		3
4	garciranti	D		4
5	Feryan	L	MBS	5
6	Nurul Hesti	P	pendamping	6
7	ASROPAH	P		7
8	Tarwi-yati	P		8
9	Itmesa Dwi Anari	L	Staf	9
10	EPHY HARYANTO	L	Bundes	10
11	Fauzan Budi	L	MBS	11
12	Alfian	L	Media	12
13	SYANDAN	L	Media	13
14	Mixanto	L	Bundes	14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25

Pelaksana Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

Kalurahan Sriharjo

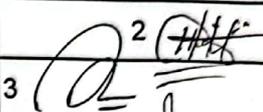
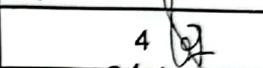
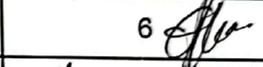
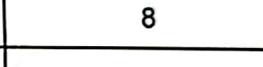
Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782

-, Email : desa.sriharjo@bantulkab.go.id , website: http://sriharjo.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

: 15.05.2023

Tempat : pendampingan management canvas
: kalurahan Sriharjo

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Tutik Nuryati	P	Jati	1 
2	Murtinah	P	Sempak	2 
3	Lilis Sutrisni	P	DOBONGAN	3 
4	Dwi setyaningsih	P	Miri	4 
5	Nural Hestiningtyas	P	Pendamping	5 
6	Ikhwan Dwi Ashari	L		6 
7	RETNO	P	JATI / KETUA	7 
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Pelaksana Kegiatan



RETNO P.



**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 **BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**

Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian**

Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan / Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif**

Sub Kegiatan : 02. Fasilitas Pendampingan

Acara : 01. Koordinasi Preneur Koperasi

Sumber Dana : PBP

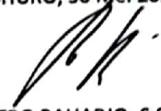
NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	22/03/2023	YU SUM	HERNITA	3402104904970001	030-211-012969	BPD	KONSUMSI	15	12,000	180,000
JUMLAH											180,000

Catatan:

1.

Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 30 Mei 2023


GOTRO RAHARJO.,S.S.I

KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦲꦶꦩꦺꦴꦂꦶ
 ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦺꦴꦱꦫꦶꦗꦺ

Alamat : Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, D.I.Yogyakarta

DAFTAR HADIR

1: RABU / 22.3 - 23

: PENDOPD JATI

: PERTEMUAN KORPRI

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Alamat / Jabatan	Tanda Tangan
1	NETNO	P	JATI / KETUA	1
2	SARA CAHYA	P	DEMEN / KETUA 2	2
3	TARWI YATI	P	Butuh	3
4	Giyanti	P	Demer	4
5	Dewi Sumarsih	P	Mojohuro	5
6	Alfi	P	Mojohuro	6
7	Istantini	P	Mojohuro	7
8	ASROFATI	P	Trulcan	8
9	NURYANTI	P	Trulcan	9
10	Ruji Winarti	P	Ketos	10
11	Novi	P	sati	11
12	Istinganah	P	Mtin	12
13	Nur Khasanah	P	Miri	13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25

NOTULEN.

41 : Robu / 22.03.2023.

: pendhapa jati

: koordinasi preneur dan koperasi

1. Melakukan pertemuan setiap minggu dan angsuran per minggu
2. Tambahan modal dari preneur.
3. Belanja Barang ada timnya sendiri shg koperasi di wujudkan barang. tdk logi uang.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦲꦩꦺꦴꦂꦶꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦺꦴꦱꦶꦫꦶꦗꦺ

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55782
Website : <https://sriharjo.bantulkab.go.id/> e-mail : desa.sriharjo@bantulkab.go.id

005 /

Sriharjo, 28 Mei 2023

: UNDANGAN

Kepada Yth.
Bpk /Ibu

Di Kalurahan Sriharjo

Dengan ini Lurah Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, mengharap kehadiran Bapak /Ibu pada :

Hari, Tanggal : Senin , 29 Mei 2023
Jam : 15:00 WIB - selesai
Tempat : Kal. Sriharjo
Acara : *Pendampingan Pengelolaan Moccaf*

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Lurah Sriharjo


TITIK ISTIYAWATUN K., S.I.P.

DAFTAR HADIR
KEGIATAN PEMBUATAN TEPUNG DAN MIE MOCCAF
KALURAHAN SRIHARJO KAPANEWON IMOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2023

Tanggal: Senin, 29 Mei 2023
 : Kalurahan Sriharjo
 : pendampingan pengelolaan moccaf

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan	
				1	2
1	Dwi Athari	Sempok	Staf	1	
2	Dwi Setyaningsih	Miri			2
3	Murtinah	sempok		3	
4	LILIS SUTRISNI	ROSONGAN			4
5	Tutik Nurxati	Jati		5	
6	Nurul Hestiningtyas	Pendamping	Pendamping		6
7				7	
8					8
9				9	
10					10
11				11	
12					12
13				13	
14					14
15				15	
16					16
17				17	
18					18
19				19	
20					20

PELAKSANA KEGIATAN


 GOTRO RAHARJO, S.Si



**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4. **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Sub Kegiatan : 02. Fasilitas Pendampingan UMa

Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian**

Acara : Snack

Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha ekonomi Produktif**

Sumber Dana : BOS PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA	PENERIMA			URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL	JUMLAH	JUMLAH DITERIMA	Ket Transaksi	
			NOTA	NAMA	NOMOR KTP	NO REK								BANK
1	5.2.1.06	09-Jun-23	YU SUM	HERNITA		30211012969	BPD	Snack	8	10.000	80.000			
JUMLAH														

Catatan:

1. Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 23 JUNI 2023
PELAKSANA KEGIATAN,


GOTRO RAHARJO, S.Si

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55782
Website : <https://sriharjo.bantulkab.go.id/> e-mail : desa.sriharjo@bantulkab.com

Nomor : 005 /
Perihal : UNDANGAN

Sriharjo, 7 Juni 2023

Kepada Yth.
Bpk /Ibu
Di Tempat

Dengan ini Lurah Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul,
mengharap kehadiran Bapak /Ibu pada :

Hari, Tanggal : Jum'at, 9 Juni 2023
Jam : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Rumah Bu Dwi Setyaningsih, Miri
Acara : *Praktek Pembuatan Mie Moca*

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Lurah Sriharjo

TITIK ISTIYAWATUN K., S.I.P.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

Kabupaten Bantul

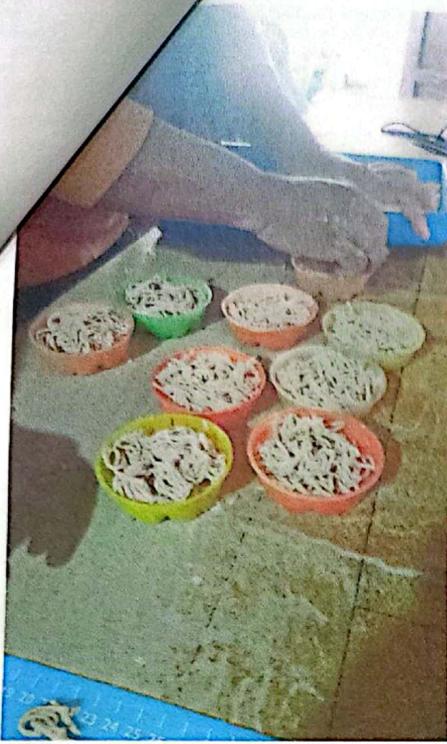
Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782
Email : desa.sriharjo@bantulkab.go.id , website: http://sriharjo.bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

09. Juni 2023.
: Praktek pembuatan mie mocaf-
: MIRI (Dwi Setyaningsih).

	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Tufik H	P	Jati	1
2	Lili Sutrisni	P	DOBONGAN	2
3	Murtidab	P	Sompok	3
4	Dwi Setyaningsih	P	Miri	4
5	Kluwon Dwi Akhari	L	Sompok	5
6	MURUL HESTIANINGSIH			6
7				7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25

Pelaksana Kegiatan



NOTULEN

iggal

: Jumat, 09 Juni 2023

: 13.00 WIB

empat

: Ibu Dwi Setyaningsih

Kegiatannya praktek membuat mie dari tepung mocaf

Cara pembuatan :

Campur tepung mocaf, telur, garam, aduk rata, tambahkan blenderan bayam, 1 sdm minyak goreng, aduk rata dan uleni hingga kalis. Lalu pipihkan adonan mie dg menggunakan cetakan/gilingan. Giling adonan yg sudah dipipihkan dengan gilingan mie ke level 2/3/4 dg ketebalan sesuai selera, taburkan tepung tapioca agar mie tidak lengket. Biarkan agar tepung mengering. Panaskan air yg diberi 1 sdm minyak goreng sampai mendidih. Rebus mie 3 menit. Angkat dan tiriskan. Mie ini bisa dibuat olahan mie goreng, mie rebus, mie ayam atau mie bakso.

Untuk membuat mie mocaf kering, masukkan adonan mie yang sudah digiling ke dalam cetakan. Kukus sebentar.

Keringkan mie mocaf dengan sinar matahari/oven

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN
Sub Bidang : 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian

Sub Kegiatan 02. Fasilitas / Pendampingan UMKM
Acara Koordinasi Preneur dan Koperasi Bumdes, Laporan Kegiatan Pameran

Kegiatan : 4.7.04 Pembentukan / Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	23-Sep-23	YU SUM	HERNITA	34021049 04970001	030-211- 012969	BPD	KONSUMSI	30	12,000	360,000
JUMLAH											360,000

Catatan:

1. Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 27 September 2023


GOTRO RAHARJO.,S.S.i




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIGIRI
KALURAHAN SRIHARJO
Sriharjo Bantul
 Jl. Mardiana, Sriharjo, Imogiri, Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55762
 Website: <http://sriharjo.bantulkab.go.id> e-mail: desa.sriharjo@bantulkab.go.id

Nomor Perihal: **UNDANGAN** Sriharjo, 20 September 2023

Kepada Yth,
Epk/ibu
ditempat

Dengan ini Lurah Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada

Hari, Tanggal: Sabtu, 23 September 2023
 Jam: 09.00 WIB - selesai
 Tempat: Ruang Rapat Kalurahan Sriharjo
 Acara: Koordinasi Preneur, Koperasi, BUMDes (Koordinasi Pengurus, Laporan Pameran, Laporan Senam, Koperasi)

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.


TITIK ISTIYAWATI K., S.I.P.



DAFTAR HADIR

september 2023.

Koordinasi Preneur, Koperasi, BUMDesa. Sriharjo

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Titik Istiyantun K.	P		1
2	Novi Dasari	P	Lurah	2
3	Botro Raharjo	P	Jati	3
4	Istantini	L	Ulu-ulu/Kujono	4
5	Anita Puji Lestari	P	Mojohuro	5
6	Siti Nurkhasamah	P	Demen RT 04	6
7	Sargiyanti	P	Pengurus / mim	7
8	Dewi Sumarsih	P	Demen RT 04	8
9	Sargiyati	P	Mojohuro, RT 02	9
10	Istingaman	P	Mim RT 01	10
11	Paripant	P	Sompok	11
12	ASROFAN	P	TRUBAH	12
13	LETNO	P	JATI	13
14	Sara Cahya	P	Demen RT 03	14
15	Sayuti	P	Sompok	15
16	Alfi	P	Mojohuro	16
17	Muyang	L	Bunkal	17
18	Ikhwan Roi Ashori	L	Staf	18
19	Pauzan Budi	L	MBS.	19
20	Megie A.	L	Tim Media	20
21	Tutik	P	Tim Moeqf	21
22	Lilis	P	Dogongen	22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

Pelaksana Kegiatan

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Sub Kegiatan 02. Fasilitas
Pendampingan
UMKM

Bidang : 4 BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang : 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian

Acara Koordinasi dan
doa Bersama
Pengurus
Preneur dan
Koperasi
Bumdes,
Pengurus Mocco

Kegiatan : 4.7.04 Pembentukan / Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.2.04	22-Sep-23	SUPARDIJANA	GOTRO RAHARJO		030.211.0 12.489	BPD	Honor Narasumber	1	200,000	200,000
2	5.2.2.04	22-Sep-23	MIYANTO,dkk	GOTRO RAHARJO		030.211.0 12.489	BPD	Honor Kebersihan	4	100,000	400,000
JUMLAH											600,000

Catatan:

1. Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 27 September 2023


GOTRO RAHARJO.,S.S.I





**PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 **BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**

Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian**

Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan / Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif**

Sub Kegiatan : 01. Fasilitasi Pengusaha
Desa Preneur dan
Koperasi UMKM

Acara : Pendampingan
Pendaftaran Si BAKUL

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	02/09/2023	YU SUM	HERNITA	3402104904970001	030-211-012969	BPD	KONSUMSI	11	25,000	275,000
JUMLAH											275,000

Catatan:

1. Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-

Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 04 September 2023



GOTRO RAHARJO, S.S.I

MIE AYAM & BAKSO DOEL PERO

NAMA / MEJA :

MENU MAKAN & MINUM	HARGA	JUMLAH
MIE AYAM BIASA 10	Rp 8 000	80.000
MIE AYAM EXTRA AYAM	Rp 10 000	
MIE AYAM EXTRA SAWI	Rp 8 000	
SAWI AYAM	Rp 7 000	
BAKSO JUMBO 9	Rp 10 000	90.000
BAKSO KECIL	Rp 10 000	
MIE AYAM BAKSO JUMBO	Rp 15 000	
MIE AYAM BAKSO KECIL	Rp 12 000	

ES TEH / PANAS 16	Rp 3 000	48.000
ES JERUK / PANAS	Rp 3 000	
ES LEMON TEA	Rp 4 000	
ES GOOD DAY	Rp 4 000	
KOPI HITAM	Rp 4 000	
AIR PUTIH	GRATISSSS	
KERUPUK RAMBAK	Rp 1 000	
KERUPUK BULAT	Rp 500	

TOTAL Rp 218.000



DAFTAR HADIR

Waktu : Sabtu. 02 September 2023 .
 Acara : Pendampingan " Pendaftaran si Bakul "
 Tempat : kal . Siharjo

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Sargiyanti	P	UMKM	1
2	Sinarsih	P	umkm	2
3	Siti Murkhasanah	P	um/km	3
4	siti rukyati	P	umkm/miti	4
5	Irfan azka	AL		5
6	Titik Ishyanurrahman	P	Lurah	6
7	Nurul Hestiningtyas	P	Pendamping	7
8	MOVITA DITA CH	P	UMKM	8
9	Sarjipati	P	UMKM	9
10	Darhanah	P	UMKM	10
11	Ikhwan Dwi Ashari	L	umkm	11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Pelaksana Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

Amang Rahmatullah

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos 55782
Website : <https://sriharjo.bantulkab.go.id/> e-mail : desa.sriharjo@bantulkab.go.id

Nomor
Perihal

: UNDANGAN

Sriharjo, 01 september 2023

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
ditempat

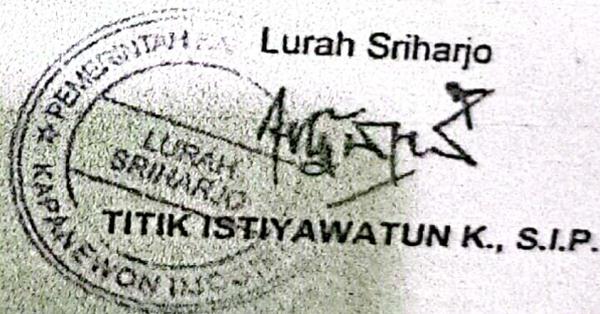
Dengan ini Lurah Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul,
mengharap kehadiran Bapak /Ibu pada :

Hari, Tanggal : Sabtu, 02 September 2023
Jam : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Kalurahan Sriharjo
Acara : **Pendampingan UMKM "Pendaftaran Si Bakul"**

Nb : Harap membawa Produk bagi yang belum mempunyai Foto produk

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Lurah Sriharjo





PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang : 4 **BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**

Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian**

Sub Kegiatan : 01. Fasilitasi Pengurus Desa Preneur dan Koperasi UMKM
Acara : Koordinasi mekanisme Pelatihan Pembuatan Mie Moccaf

Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan / Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif**

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	11/09/2023	YU SUM	HERNITA	3402104904970001	030-211-012969	BPD	KONSUMSI	5	25,000	125,000
JUMLAH											125,000

MOJOHURO, 12 September 2023

GOTRO RAHARJO.,S.S.i

Catatan:
1.

Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
 Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibeban pada penerima transfer

100.000
 Konsumsi
 rapat moccaf
 tamu.

Waktu : Senin, September 2023
 Acara : Koordinasi Pembuatan Mic Mocar
 Tempat : Kal. Sriharjo

DAFTAR HADIR

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Ikhsan Dwi Akhari	L	Staf	1
2	Gotro Raharjo	L		2
3	Tutik Nuryati	L	Ulu-ulu	3
4	Murtinah	P	Gati PKK	4
5	Dwi Setyaningsih	P	Sompok	5
6	Lilis Sutrisni	P	Mini	6
7		P	DOBONGAN	7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Pelaksana Kegiatan



**PEMERINTAH KALURAHAN SRIHARJO
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN

Sub Bidang : 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian

Kegiatan : 4.7.04 Pembentukan / Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

Sub Kegiatan

Acara

Sumber Dana : PBP

01. Fasilitas Angkutan
Dasar Pemukiman
Koperasi UNMSA
Koordinasi Pengusaha
Preneur dan Koperasi

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	13/09/2023	YU SUM	HERNITA	3402104904970001	030-211-012969	BPD	KONSUMSI	10	25,000	250,000
JUMLAH											250,000

Catatan:

1.

Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 14 September 2023

(Signature)
GOTHO RAHARJO, S.S.i

Waktu : 12/09/2023
 Acara : Koordinasi pengurus precur dan kop-urasi
 Tempat : Kal. Sriharjo

DAFTAR HADIR

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Ali	P		
2	Asropati	P		
3	Intan	P		
4	Tri Ningsih	P		
5	Anita Puji Lestari	P		
6	Tarwiyati	P		
7	Giyanti	P		
8	Puji Winarti	P		
9	Istingannu	P		
10	Dewi Kurniasari	P		
11	Istantini	P		
12	Sarjijati	P		
13	Dewi Sumarsih	P		
14	RETNO	P		
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Pelaksana Kegiatan









**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Bidang : 4 **BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**
Sub Bidang : 4.7 **Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian**

Sub Kegiatan : 02. Fasilitas /
 Pendampingan UMKM
Acara : Pendampingan
 Pendaftaran Merek

Kegiatan : 4.7.04 **Pembentukan / Fasilitas/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha
 Ekonomi Produktif**

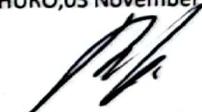
Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
2	5.2.1.06	24-Oct-23	YU SUM	HERNITA	34021049 04970001	030-211- 012969	BPD	KONSUMSI	12	15,000	180,000
JUMLAH											180,000

Catatan:

1. Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
 Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer

MOJOHURO, 03 November 2023


 GOTRO RAHARJO., S.S.i



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI
KALURAHAN SRIHARJO

Kanwil Bantul

Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul, DIY Yogyakarta 55782
Tlp. -, Email : desa.sriharjo@bantulkab.go.id , website: http://sriharjo.bantulkab.go.id

Waktu : 24 Oktober 2023
Acara : pendampingan pendaftaran merk
Tempat : kal Sriharjo

DAFTAR HADIR

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Sayuti	P	Sompok	1
2	ASROFATI	P	TRUKAN	2
3	Siti Sukyati	P	miri wetan	3
4	Sumarsih	P	Daman	4
5	Nurul Hestiningtyal S.F	P	Pendampingan	5
6	Ikhwan Rai Aslani	L	Ach	6
7	Sarjityati	P	Mojohuro	7
8	Dewi Sumarsih	P	Mojohuro	8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35

Pelaksana Kegiatan



SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang : 4 BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian

Sub Kegiatan : 02. Fasilitasi /
 Pendampingan UMKM
 Acara : Pendampingan
 Pembuatan Sertifikasi
 Halal

Kegiatan : 4.7.04 Pembentukan / Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha
 Ekonomi Produktif

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.2.04	01-Nov-23	AMIN SHOLIKHIN	GOTRO RAHARJO		030.211.0 12.489	BPD	NARASUMBER	1	200,000	200,000
2	5.2.1.06	01-Nov-23	YU SUM	HERNITA	34021049 04970001	030-211- 012969	BPD	KONSUMSI	12	12,000	144,000
JUMLAH											344,000

MOJOHURO, 03 November 2023


 GOTRO RAHARJO, S.S.i

Catatan:
 1.

Biaya transfer sesama Bank BPD Rp.0,-
 Biaya transfer ke bank lain Rp.2.900, dibebankan kepada penerima transfer



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

No	Nama	Alamat	NO HP	Tanda Tangan
1	Varianto			
2	Agustin	Candora		
3	SPI BINTARAWATI	Domas Jati	08570055523	
4	Supriyati	PEPEM PURI TIMUR	08120402834	
5	Muhammad Icham	Kamrang Imogiri	0895342976068	
6	Yuliani	KETEN Imogiri	08589688361947	
7	Suleanto	Bondosuli Imogiri	080226689091	
8	Radiana	Sungapan Imogiri	08522908211	
9	Rumini	Sampar Imogiri	087139852429	
		Sompok Imogiri	088216749020	
			087839308515	

Waktu : 01 Nov 2023
 Acara : Penerimaan peminatan sertifikasi kelas
 Tempat : kal sriharjo

DAFTAR HADIR

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Sarjono	L	Gondosuli	1
2	ngedini	P	dati	2
3	Yulianti	P	Gondosuli	3
4	Sukanto	L	Sungapuri	4
5	parixanti	P	Compol	5
6	purnini	P	sempok	6
7	Huwari			7
8				8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34
35				35

Pelaksana Kegiatan





SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAHUN ANGGARAN 2023

Bidang : 4 BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN
 Sub Bidang : 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian

Sub Kegiatan : 02. Fasilitasi /
 Pendampingan UMKM
 Acara : Tambahan Peserta
 Pelatihan Pengembangan
 Aneka Olahan Pangan di
 Miri

Kegiatan : 4.7.04 Pembentukan / Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha
 Ekonomi Produktif

Sumber Dana : PBP

NO	KODE REKENING BELANJA	TGL	NAMA NOTA	PENERIMA				URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
				NAMA	NOMOR KTP	NO REK	BANK				
1	5.2.1.06	03-Nov-23	YU SUM	HERNITA	34021049 04970001	030-211- 012969	BPD	KONSUMSI	36	25,000	900,000
JUMLAH											
											900,000

Catatan:
1.

03 November 2023

Handwritten notes:
 Konsumsi foto
 Transport. / miri
 Pelatihan foto miri

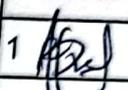
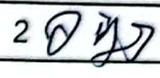
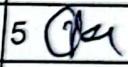
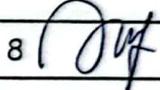






DAFTAR HADIR

Tempat

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Tarawati	P	preneur	1 
2	Istiqomah	P	preneur	2 
3	Saripati	P	preneur	3 
4	Dewi Sumarsih	P	preneur	4 
5	Sayuti	P	preneur	5 
6	ASROFATI	P	preneur	6 
7	Karni	P	preneur	7 
8	Siti Nurkhasanah	P	preneur	8 
9	Ilman Dwi A			9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Pelaksana Kegiatan



DAFTAR HADIR

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Sayuti			
2	RETNO	P	Preneur	1
3	ASROPAH	P	PRENEUR	2
4	Tarawati	P	Preneur	3
5	Istingmah	P	preneur	4
6	Sarjizat	P	preneur	5
7	Siti mukkasamah	P	preneur	6
8	Dewi Sumarsih	P	preneur	7
9				8
10				9
11				10
12				11
13				12
14				13
15				14
16				15
17				16
18				17
19				18
20				19
				20

Pelaksana Kegiatan

02/08/2019
08:15:00
000000

DAFTAR HADIR

Tempat

No	Nama	L/P	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1	Asrofah	P	preneur	1
2	Rayan	P	preneur	2
3	Sarjijah	P	preneur	3
4	Neto	P	preneur	4
5	Tarwiyati	P	preneur	5
6	Istingamah	P	preneur	6
7	Fiti Nurkhasanah	P	preneur	7
8	Dewi Sumarsih	P	preneur	8
9				9
10				10
11				11
12				12
13				13
14				14
15				15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20

Pelaksana Kegiatan